

MATRIKS ANALISIS FRAMING ZHONGDAN PAN DAN GERALD M. KOSICKI TENTANG KONFLIK KNPI 2008-2011

1. Kongres Kembar (Kongres Ancol, 23-24 Oktober 2008) dan (Kongres Bali 30 Oktober 2008)

ELEMEN	KOMPAS	JURNAL NASIONAL	REPUBLIKA
Frame	Terjadi dualisme KNPI sebagai produk dari kongres kembar, Kongres Ancol dan Kongres Bali	Terjadi dualisme Kongres KNPI (Kongres Ancol dan Kongres Bali)	Terjadi dua Kongres KNPI (Kongres Ancol dan Kongres Bali)
Sintaksis	Sebagai pagenews berita konflik KNPI selanjutnya	Sebagai pagenews berita konflik KNPI selanjutnya	Wawancara Menteri Pemuda dan Olahraga (2004-2009) Adhyaksa Dault. Ia meminta hanya ada satu KNPI. Kedua KNPI yang terpecah (Ancol dan Bali) harus segera rekonsiliasi
Skrip			Sejak awal hingga akhir menulis gagasan Adhyaksa tentang persatuan KNPI. Tidak ada nara sumber pembanding.
Tematik			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi KNPI 2. Mekanisme rekonsiliasi 3. Waktu rekonsiliasi
Retoris			Ada penekanan waktu satu minggu untuk rekonsiliasi. Meski berita lintas namun disimpan di kiri atas yang memudahkan pembaca menangkapnya.

2. Bentrok di sekretariat DPP KNPI Kuningan, Jakarta Selatan (27 Februari 2009)

ELEMEN	KOMPAS	JURNAL NASIONAL	REPUBLIKA
Frame	Menekankan kerusakan sekretariat DPP KNPI Kuningan, Jakarta Selatan. Tindakan anarkisme akibat dualisme KNPI	Tidak menulis berita. Tidak juga menjadikannya sebagai pagenews.	Menekankan kerusakan sekretariat DPP KNPI Kuningan, Jakarta Selatan. Tindakan anarkisme akibat dualisme KNPI
Sintaksis	Wawancara Ahmad Doli Kurnia (KNPI Ancol), saksi mata, dan Polsek Setiabudi		Wawancara Ketua Umum KNPI Ancol, Ahmad Doli Kurnia, menyebutkan ancaman melalui <i>short message service</i> (SMS). Tidak mewawancarai polisi yang berwenang menangani pengrusakan kantor DPP KNPI.
Skrip	Menakanan pada pengrusakan yang dilakukan kelompok massa yang tidak dikenal		Menempatkan pendapat Doli sebagai narasumber tunggal sehingga terkesan kubu Doli sebagai korban dari pengrusakan ini.
Tematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kerusakan 2. Lima aktivis KNPI terluka 3. 10 orang perusuh 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksi pengrusakan kantor DPP KNPI Kuningan, Jakarta Selatan 2. Pengrusakan merupakan ulah sekelompok yang tidak suka dnegan KNPI Ancol 3. Munculnya pesat pendek (SMS) ancaman 4. Polisi mengamankan lokasi dengan memasang police line. Tidak ada keterangan apapun dari kepolisian
Retoris	Foto kerusakan sekretariat DPP KNPI dengan caption penyerangan diduga terkait dengan dualisme KNPI		Foto kerusakan sekretariat DPP KNPI dengan caption kerusakan sekretariat. Mengangkat pesan pendek (SMS) yang bernada ancaman dan teror menegaskan

			aksi pengrusakan telah direncanakan sebelumnya.
--	--	--	---

3. Rekonsiliasi (Kongres KNPI Bersama) di Jakarta (24-28 Oktober 2011)

ELEMEN	KOMPAS	JURNAL NASIONAL	REPUBLIKA
Frame	Kongres bersama ajang rekonsiliasi KNPI Ancol dan Kongres Bali	Kongres bersama ajang rekonsiliasi KNPI Ancol dan Kongres Bali	Kongres bersama ajang rekonsiliasi KNPI Ancol dan Kongres Bali
Sintaksis	Wawancara Ketua Umum KNPI 2011-2014, Topan Rotorasiko. Kongres Jakarta adalah kongres rekonsiliasi antara KNPI Ancol dan KNPI Denpasar	Wawancara Marzuki Ali, beberapa kandidat Arif Mustopa, Topan Rotorasiko. Semua pendapat mendapat porsi yang seimbang	Wawancara Topan Rotorasiko dan Oktasari Sabil (Ketua Umum Gemura). Menempatkan proses pemilihan sebagai lead dan sebagian besar dinamika kongres.
Skrip	Menceritakan proses pemilihan ketua umum KNPI. Hiruk pikuk kongres tidak terpotret.	Menceritakan semua dinamika kongres bersama, termasuk aksesorisnya seperti dugaan politik uang	Semua aksesoris diceritakan dengan berbagai sumber berita. Hanya saja berita ini didominasi dan penekanan pada pencalonan dan pemilihan Ketua Umum KNPI.
Tematik	1. Proses pencalonan Ketua Umum KNPI 2. Proses pemilihan Ketua Umum KNPI 3. Penyelesaian dualisme KNPI di beberapa daerah	1. Dugaan politik uang dalam proses pemilihan Ketua Umum KNPI 2. Adu gagasan sesama kandidat 3. Akomodasi semua potensi pemuda	1. Proses pencalonan dan pemilihan Ketua Umum KNPI 2. Dinamika perebutan suara untuk menjadi Ketua Umum KNPI 3. Komitmen Topan Rotorasiko sebagai formatur terpilih untuk menyatukan dan kembali ke khittah KNPI.
Retoris	KNPI yang sah adalah hasil Kongres Bersama di Jakarta karena sesuai dengan kesepakatan bersama daqn AD ART KNPI	KNPI yang sah adalah hasil Kongres Bersama di Jakarta karena sesuai dengan kesepakatan bersama daqn AD ART KNPI	1. KNPI yang sah adalah hasil Kongres Bersama di Jakarta karena sesuai dengan kesepakatan bersama. 2. Judul "Menantu Ical Pimpin KNPI" menekankan pada Aburizal Bakrie (Ical), Ketua Umum dan kandidat presiden dari Partai Golkar.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAMING KOMPAS, JURNAL NASIONAL, DAN REPUBLIKA

IDEOLOGI

KOMPAS Humanisme Transendental	JURNAL NASIONAL Nasionalisme Religius (sebagaimana ideologi yang kerap disampaikan salah satu pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono)	REPUBLIKA Islam
--	--	---------------------------

POLITIK

KOMPAS Tidak ada	JURNAL NASIONAL Memiliki kaitan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pribadi. Tidak memiliki keterikatan dengan Partai Demokrat. Namun sulit menepis kctidakterkaitan tersebut karena Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.	REPUBLIKA Tidak ada
----------------------------	--	-------------------------------

EKONOMI

KOMPAS Tidak secara langsung mencari keuntungan ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah efek dari penemuan pembaca muda yang merupakan simbol perubahan seperti tercantum dalam <i>tagline</i> Kompas "Lintas Generasi"	JURNAL NASIONAL Berita konflik KNPI 2008-2011 dibaca aktivis KNPI. Pengaruh ekonomi langsung tidak ada.	REPUBLIKA Tidak mengetahui efek pemberitaan konflik KNPI 2008-2011 meningkatkan oplah pembaca atau pemasangan iklan
---	---	---

IDEALISME KOMPAS	JURNAL NASIONAL	REPUBLIKA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menemukan solusi dari konflik KNPI melalui dengan melibatkan pihak ketiga. 2. Keutuhan KNPI harus dijaga karena ia merupakan salah satu aset yang memproduksi pemimpin masa depan bangsa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keutuhan organisasi kepemudaan yang berpaham kebangsaan 2. KNPI harus dijaga sebagai aset organisasi kepemudaan. Persatuan membuat KNPI lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi bangsa dan negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada organisasi kepemudaan yang berbasis Islam untuk menyuarakan alternatif solusi penyelesaian konflik KNPI 2008-2011 2. Konflik KNPI 2008-2011 sebagai konflik elite organisasi kepemudaan. Makanya tidak boleh dibiarkan berlarut dan harus diselesaikan secepatnya 3. Konflik KNPI 2008-2011 di pusat bisa merembet ke kepengurusan di daerah dan wilayah. Makanya harus secepatnya dicarikan solusinya sehingga tidak mengganggu sistem kehidupan yang lain

AKUMULASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAMING KOMPAS, JURNAL NASIONAL, DAN REPUBLIKA

KOMPAS

IDEOLOGI	POLITIK	EKONOMI	IDEALISME
Humanisme Transendental	Tidak ada	Tidak secara langsung mencari keuntungan ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah efek dari penemuan pembaca muda yang merupakan simbol perubahan seperti tercantum dalam <i>tagline</i> Kompas "Lintas Generasi"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menemukan solusi dari konflik KNPI melalui dengan melibatkan pihak ketiga. 2. Keutuhan KNPI harus dijaga karena ia merupakan salah satu aset yang memproduksi pemimpin masa depan bangsa

JURNAL NASIONAL

IDEOLOGI	POLITIK	EKONOMI	IDEALISME
Nasionalisme Religius (sebagaimana ideologi yang kerap disampaikan salah satu pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono)	Memiliki kaitan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pribadi. Tidak memiliki keterikatan dengan Partai Demokrat. Namun sulit menepis ketidakterkaitan tersebut karena Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat	Berita konflik KNPI 2008-2011 dibaca aktivis KNPI. Pengaruh ekonomi langsung tidak ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keutuhan organisasi kepemudaan yang berpaham kebangsaan. 2. KNPI harus dijaga sebagai aset organisasi kepemudaan. Persatuan membuat KNPI lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi bangsa dan negara.

REPUBLIKA

IDEOLOGI	POLITIK	EKONOMI	IDEALISME
Islam	Tidak ada	Tidak mengetahui efek pemberitaan konflik KNPI 2008-2011 meningkatkan oplag pembaca atau pemasangan iklan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada organisasi kepemudaan yang berbasis Islam untuk menyuarkan alternatif solusi penyelesaian konflik KNPI 2008-2011 2. Konflik KNPI 2008-2011 sebagai konflik elite organisasi kepemudaan. Makanya tidak boleh dibiarkan berlarut dan harus diselesaikan secepatnya 3. Konflik KNPI 2008-2011 di pusat bisa merembet ke kepengurusan di daerah dan wilayah. Makanya harus secepatnya dicarikan solusinya sehingga tidak mengganggu sistem kehidupan yang lain

PEDOMAN WAWANCARA

KOMPAS

1. Bagaimana Kompas memandang konflik KNPI 2008-2011?
2. Apakah dari sudut pandang tersebut KNPI 2008-2011 layak menjadi berita?
3. Apakah Kompas memandang atau menemukan KNPI 2008-2011 sebagai konflik internal atau ada campur tangan negara/kekuasaan dalam KNPI 2008-2011?
4. Bagaimana Kompas mengkonstruksi konflik KNPI 2008-2011 menjadi sebuah berita yang layak dimuat?
5. Faktor-faktor apa saja yang mengkonstruksi wartawan Kompas sehingga dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?
6. Sebagai pemimpin pasar atau pemilik oplah terbesar, apa kepentingan Kompas memuat berita konflik KNPI 2008-2011?
7. Adakah pertimbangan ekonomi, politis, ideologis, atau idealisme dalam menulis dan memuat konflik KNPI 2008-2011?
8. Adakah karakter khas Kompas dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?
9. Apakah berita KNPI juga untuk mencari pembaca di kalangan pemuda atau pembaca muda baru Kompas?

JURNAL NASIONAL

1. Bagaimana Jurnal Nasional memandang konflik KNPI 2008-2011?
2. Apakah dari sudut pandang tersebut KNPI 2008-2011 layak menjadi berita?
3. Apakah Jurnal Nasional memandang atau menemukan KNPI 2008-2011 sebagai konflik internal atau ada campur tangan negara/kekuasaan dalam KNPI 2008-2011?
4. Bagaimana Jurnal Nasional mengkonstruksi konflik KNPI 2008-2011 menjadi sebuah berita yang layak dimuat?
5. Faktor-faktor apa saja yang mengkonstruksi wartawan Jurnal Nasional sehingga dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?
6. Sebagai koran yang diasumsikan dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat, apa kepentingan Jurnal Nasional memuat berita konflik KNPI 2008-2011?
7. Adakah pertimbangan ekonomi, politis, ideologis, atau idealisme dalam menulis dan memuat konflik KNPI 2008-2011?
8. Adakah karakter khas Jurnal Nasional dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?

REPUBLIKA

1. Bagaimana Republika memandang konflik KNPI 2008-2011?
2. Apakah dari sudut pandang tersebut KNPI 2008-2011 layak menjadi berita?
3. Apakah Republika memandang atau menemukan KNPI 2008-2011 sebagai konflik internal atau ada campur tangan negara/kekuasaan dalam KNPI 2008-2011?
4. Bagaimana Republika mengkonstruksi konflik KNPI 2008-2011 menjadi sebuah berita yang layak dimuat?
5. Faktor-faktor apa saja yang mengkonstruksi wartawan Republika sehingga dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?
6. Sebagai koran yang diasumsikan surat kabar Islam, apa kepentingan Republika memuat berita konflik KNPI 2008-2011?
7. Adakah pertimbangan ekonomi, politis, ideologis, atau idealisme dalam menulis dan memuat konflik KNPI 2008-2011?
8. Adakah karakter khas Republika dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?

TRANSKRIP WAWANCARA KOMPAS

Nara sumber : Kepala Deski Politik, Hukum dan HAM Kompas, Mohamad Subhan
Hari/tanggal : Kamis, 19 Juli 2012,
Pukul : 17.30 WIB
Tempat : Kantor Kompas, Jalan Palmerah, Jakarta Pusat

1. Bagaimana Kompas memandang konflik KNPI 2008-2011?

Kompas tidak pernah melihat konflik sebagai suatu komoditas. Jadi barangkali dalam kebijakan Kompas. Tidak diberitakan luas. Apalagi bombastis. Kompas selalu berpedoman. Dalam memberitakan satu masalah maka titik temu dalam satu masalah adalah memberikan solusi. Maka dalam pemberitaan apapun juga, termasuk dalam konflik KNPI kita tidak akan membombardir menjadi berita yang besar. Kita mencari frame, solusi damai. Win win solusi. Itu yang menjadi kebijakn kami.

2. Apakah dari sudut pandang tersebut KNPI 2008-2011 layak menjadi berita?

Jadi sebetulnya kita butuh yang namanya OKP pemuda karena menjadi estapeta kepemimpinan masa depan. Seperti KNPI sangat penting. Meskipun KNPI organisasi sulit untuk independen. Underbouw. Meskipun dia tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu tetapi setidaknya dia memiliki cantelan pada politik tertentu. Kita melihat KNPI seperti OKP yang lain ini sesuatu yang penting dan ini yang perlu kita rawat. Yang kita dorong dan OKP kita harus mandiri dan independen. Kita bicara konflik maka kebijakannya adalah mencari solusi. Kalau masih pemuda saja sudah berkonflik. Nanti sudah tua tambah ribut. Ini yang didorong Kompas. Bagaimana mereka mencari penyelesaian sendiri. *win win solution*. Membuang ego sektoral, egosentris mereka. Demi kemaslahatan, mereka harus satu titik tujuan.

3. Apakah Kompas memandang atau menemukan KNPI 2008-2011 sebagai konflik internal atau ada campur tangan negara/kekuasaan dalam KNPI 2008-2011?

Sebenarnya sejak reformasi kita sudah sepakat, bahkan kita sudah mempraktikkan intervensi pemerintah sudah sangat jauh sangat berkurang. Karena siapa yang bisa mengontrol rakyat. Rakyat ini tidak terkontrol. Pemerintah tidak mampu untuk mengontrol. Tetapi persoalannya dalam politik tidak ada yang berpikir linear. Tidak ada yang lurus. Pasti ada pemak-pernik, penyimpangan, dan anomali-anomali. Saya kira di kalangan pemuda juga begitu. Si A masuk kelompok tertentu kelompok B dengan organisasi massa tertentu. Saya kira ini yang perlu diteliti. Pemerintah juga punya kepentingan. Sejauhmana kepentingan dan keterlibatan mereka. Ini tidak mudah membuktikan gerakan-gerakan seperti itu. Tetapi saya kira juga pemerintah tidak akan melepas. Karena kelompok ini juga bisa dipergunakan untuk kebijakan tertentu. Apalagi sekarang ini semakin banyak organisasi kepemudaan yang semakin menonjol. Semakin kuat. Sejak reformasi publik ini semakin susah dikendalikan.

4. Bagaimana Kompas mengkonstruksi konflik KNPI 2008-2011 menjadi sebuah berita yang layak dimuat?

Yang pertama membuat berita adalah fakta di lapangan. Ini yang tidak boleh kita tolak. Apapun yang terjadi di sana harus kita ungkapkan publik harus tahu. Suka atau tidak suka ini yang kita berikan. Langkah berikutnya bagaimana berita itu menjadi berimbang. Kalau kita bicara konflik tentu ada pihak yang bersebrangan. Dan konstruksi sebuah berita adalah memberikan dua belah pihak atau lebih untuk memiliki hak yang sama dalam pemberitaan. Tidak berat sebelah. Dilarang tidak berimbang. Harus dua-duanya. Satu kubu punya suara-kubu lainnya juga memiliki hak yang sama. Tetapi kita selalu

mengembel-embelin dengan pihak ketiga yang memberikan jembatan di antara yang berkonflik. Yang jelas Kompas tidak akan memanas-manasi kedua kelompok itu. Kompas harus mencari jembatan. Kompas biasanya kelompok ketiga yang bisa, bisa dari pihak internal sendiri atau pihak luar yang berkaitan dengan itu.

5. **Sebagai koran yang diasumsikan pemimpin pasar Kompas memuat berita konflik KNPI 2008-2011?**

Pentingnya peran pemuda dan KNPI ini sebagai organisasi yang lebih luas, nasional. Lebih beragam, tidak seragam, tidak mono ideologi. Tetapi pencampuran dengan ideologi lain. Ini asset buat kita. Tergantung kita apakah aset ini mau kita jaga atau tidak. Tetapi sebagai sebuah koran yang memberi informasi, Kompas harus merawat dan menjaganya sehingga KNPI ini memberi yang terbaik. Boleh saja KNPI ini dimanfaatkan oleh banyak pihak tetapi kita harus menjaga sehingga berada dalam *rule* yang benar. Pentingnya peran pemuda dan organisasi itulah yang menjadikan KNPI penting menjadi sebuah berita karena menjadi sarana estapeta kepemimpinan masa depan. Jika kita salah dalam memberi kemudi ini maka kita akan tersesat. Tetapi kalau benar sesuai dengan Kompas yang kita berikan, ia akan berjalan di arah yang baik.

Berita itu menunggu dari langit. Taken for granted. Seperti hujan. Tetapi sebagai wartawan kita harus selalu *men-create*, membuat agenda setting apa yang kita rasakan. Yang terpenting adalah kebijakan publik. Apa yang bergejolak dalam hati masyarakat. Misalnya, ketidaksenangan terhadap koruptor. Kita berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dari satu pihak ke pihak lain. Tujuannya bukan untuk menjelekkkan seseorang. Target kita adalah bagaimana memberantas korupsi ini menjadi hilang. Pada semua berita termasuk KNPI, berita Kompas seperti itu. Kompas harus membuat agenda setting dan

yang kita akang sehingga dibaca pemangku kekuasaan, kepentingan sehingga dibuat kebijakan berdasarkan pemberitaan itu. Oleh sebab itu pemberitaan tidak boleh salah, baik data fakta. Dan, kita tidak boleh memiliki tendensi terhadap kepentingan tertentu. Kompas selalu berbicara untuk kepentingan publik.

6. Adakah pertimbangan ekonomi, politis, ideologis, atau idealisme dalam menulis dan memuat konflik KNPI 2008-2011?

Saya kira dalam semua berita yang melandasi Kompas, kami memiliki visi dan misi yang tidak tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, ekonomi sebagai dampak. Bahwa nanti berita laku dijual dan orang itu datang, Kompas harus komit terhadap visi dan misinya. Yang penting Kompas itu dia mencerdaskan publik, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Bukan sekedar pintar. Semakin publik kain cerdas bangsa ini kian maju. Cerdas yang mencerahkan. Kompas tidak berpolitik. Jangankan KNPI, partai politik saja tidak. Kita melepaskan dari semua itu. Begitu juga dengan ideologi. Ideologi dalam pengertian bagaimana bicara tentang, publik, kebangsaan, kerakyatan. Bukan ideologi dalam arti isme-isme.

7. Adakah karakter khas Kompas dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?

Berita ini tidak terlalu besar, saya kita frame dan fokus kita juga tidak terlalu besar. Kita melihat berita *running news*, yang setiap saat ada. Kita tidak terlalu menekankan dalam fokus tertentu. Yang penting bagi kami adalah bagaimana memberitakan secara berimbang. Dan kalau berbicara konflik maka pemberitaan kami mendorong agar konflik ini teratasi.

8. Apakah berita KNPI juga untuk mencari pembaca di kalangan pemuda atau pembaca muda baru Kompas?

Saya kira begini. Kita kembali ke beberapa tahun lalu. Kompas termasuk yang memelopori. Sejak 2005, tagline berubah menjadi “Lintas Generasi.” Bahwa pembaca Kompas bukan orang yang mapan secara ekonomi, politik, ideologi, sosial tetapi juga anak-anak muda yang baru tumbuh yang memiliki kegairahan membaca. Nah, kita mencoba menjembati hal ini. Misalnya, Kompas memiliki rubrik khusus “Kompas Muda. Itu adalah ruangan anak muda, SMA, mahasiswa, pemuda dan pemuda yang lain. Saya kira dalam hidup semua manusia ada perkembangannya Pembaca lama akan hilang. Pembaca baru inilah yang harus kita bidik. Saat ini banyak koran menjadi *follower*. Saya kira tidak menjadi masalah bukan milik sebuah kelompok. Semuanya sah-sah saja. Kita harus fokus terhadap sesuatu yang bisa dijual dan lebih *marketabl* sehingga orang berkompetisi secara sehat. Saya kira ini adalah titik temu, walaupun tidak ada melulu mencari pembaca muda karena kepentingannya pada saat pemberitaan adanya peristiwa KNPI. Bahwa nanti itu ada singgungan dengan mencari pembaca muda itu terjadi dengan sendirinya.

TRANSKRIP WAWANCARA JURNAL NASIONAL

Nara sumber : Jan Prince Permata (Redaktur Politik dan Hukum
Jurnal Nasional)

Hari/tanggal : Selasa, 5 Juni 2012

Pukul : 16.00 WIB

Tempat : Kantor Jurnal Nasional, Jalan Johar 9 Menteng,
Jakarta Pusat

1. Bagaimana Jurnal Nasional memandang konflik KNPI 2008-2011?

Kalau kita melihat konflik KNPI yang memiliki struktur yang sampai ke Tingkat II dan hampir di seluruh kabupaten memiliki. Jadi relasinya dengan politik sangat dekat. Konflik KNPI yang terjadi 2008-2011 sangat dekat dengan politik. Sebagai personal-personal KNPI memiliki keinginan politik ke depan bertemu dengan kepentingan-kepentingan keinginan elite. Personal yang ingin mengkapitalisasi yang menginginkan KNPI untuk kepentingan dia dan bertemu dengan keinginan elite yang memiliki ambisi sama. Kalau kita tanya apakah KNPI bisa menggerakkan pemuda? Sebenarnya ngak. Dalam kacamata politik formal, KNPI diperlukan dan ini yang mempunyai kekuatan.

2. Apakah dari sudut pandang tersebut KNPI 2008-2011 layak menjadi berita?

Ya. Sebenarnya dia menjadi layak karena legimitasi politik formal. Kita boleh saja KNPI tidak memiliki legimitasi pemuda tetapi jika kita memandang KNPI di daerah banyak kepala daerah yang menjadi aktivis KNPI sehingga dengan itu ia menjadi berita. Karena di beberapa daerah banyak ketua KNPI yang menjadi bupati. Ia tetap menjadi unsur berita. Apalagi KNPI tempat berhimpun pemuda-pemuda yang dari berbagai kelompok terutama Kelompok Cipayang. Pada zaman dulu, KNPI yang diasumsikan untuk

menggodok calon politisi terutama bagi Golkar. Banyak tokoh KNPI yang menjadi politisi seperti Akbar Tanjung, Cosmos Batubara, Tjahjo Kumolo dan lain-lain. Jadi tetap walaupun secara organisasi formal tidak bisa menggerakkan pemuda namun secara formal ia tetap diperhitungkan karena memiliki relasi dengan elite-elite politik lainnya. Artinya, secara berita politik ia menjadi penting.

3. Apakah Jurnal Nasional memandang atau menemukan KNPI 2008-2011 sebagai konflik internal atau ada campur tangan negara/kekuasaan dalam KNPI 2008-2011?

Sebenarnya elite kekuatan langsung tidak. Tetapi dalam kekuasaan konteks senioritas. Malah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak atau jarang memberi perhatian besar malah lebih besar kepada HMI dan GMNI, misalnya. Jadi pemerintahan SBY agak berbeda memandang KNPI kali ini. Beberapa kali permintaan audiensi tidak pernah dikabulkan. Saya ngak ada kekuasaan yang terlibat. Tetapi kalau elite-elite yang memanfaatkan KNPI itu iya. Jadi kita tidak memandang ada kekuasaan dalam konflik kali ini.

4. Bagaimana Jurnal Nasional mengkonstruksi konflik KNPI 2008-2011 menjadi sebuah berita yang layak dimuat?

Posisi Jurnal Nasional adalah KNPI tetap berharap tempat berhimpun para pemuda untuk berimprovisasi. Pemberitaan-pemberitaan kita lebih pada himbauan KNPI bersatu karena KNPI punya jaringan-jaringan yang di daerah. Prinsipnya, kita bersatu. Konstruksinya kita mencoba melihat dibalik yang berkonflik Doli dan Aziz. Doli kita berikan tempat begitu juga Aziz. Apa problemnya dari keduanya. Kita juga tampilkan secara proporsional. Bahkan dari pemerintahan dan MPR kita minta masukan. Jurnal Nasional

tidak terlalu detail membahas tetapi mendorong melakukan rekonsiliasi sehingga bermanfaat bagi bangsa dan bernegara. Dengan bersatu lebih bermanfaat. Jurnal Nasional tidak melihat Aziz dan Doli. Kedua-duanya ada di Golkar. Maka bersatulah. Dengan kalian bersatu manfaatnya lebih besar daripada terpecah-pecah. Prinsipnya di situ

5. Faktor-faktor apa saja yang mengkonstruksi wartawan Jurnal Nasional sehingga dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?

Pertama, di Jurnal Nasional banyak wartawan yang kadang-kadang romantisme karena berasal dari HMI, GMNI, PMKRI dan lain-lain. Aliyudin Sofyan dari HMI Ciputat (IAIN Syarif Hidayatullah) Kadang teman-teman terlibat secara langsung tidak langsung merasa ada kedekatan dengan KNPI. Itu yang mendorong Jurnal Nasional menulis tentang KNPI. Faktor lain, mereka-mereka yang berkonflik juga melakukan pendekatan ke pers, seperti pernyataan-pernyataan. Secara khusus kita ingin menampilkan KNPI menjadi sebuah berita yang tidak biasa. Pertimbangan mendasar tidak harus ada berita. Tetapi karena ada kedekatan wartawan Jurnal Nasional dengan aktivis KNPI, maka berita-berita KNPI terus berjalan. Jurnal Nasional tidak melakukan liputan langsung untuk rekonsiliasi misalnya. Tidak juga.

6. Sebagai koran yang diasumsikan dekat dengan pemerintah, apa kepentingan Jurnal Nasional memuat berita konflik KNPI 2008-2011?

Susilo Bambang Yudhoyono seorang tokoh yang percaya pada demokrasi. Susilo Bambang Yudhoyono kita anggap sebagai pemimpin yang konsen terhadap isu regenerasi kepemimpinan. KNPI sebagai tempat berhimpun pemuda kita anggap tetap sebagai sebuah tempat melahirkan ketokohan pemuda di luar dari kampus dari organisasi Cipayang, organisasi profesi. Berita ini perlu ditampilkan. Jurnal yang dibaca presiden

juga supaya presiden mengetahui dinamika di pemuda. Selain itu jika KNPI bersatu bisa melakukan sinergitas dengan program-program kepemuduaan di pemerintah. Presiden tidak mau bertemu karena ia tahu di KNPI ada konflik. Jika bertemu salah satu pihak ia dianggap memihak. Sehingga ia menghindar. Jika KNPI tidak ada masalah Presiden akan menemuinya. HMI dan GMNI saja ditemui apalagi KNPI. Nah, KNPI itu harus ditampilkan seperti itu.

7. Adakah pertimbangan ekonomi, politis, ideologis, atau idealisme dalam menulis dan memuat konflik KNPI 2008-2011?

Kita lebih memiliki pertimbangan pada ideologi dan idelisme. Karena bicara untuk mendorong organisasi-organisasi terutama bervisi kebangsaan tetap muncul. Koran kita lahir 1 Juni ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato tentang Pancasila. Bagi Jurnal Nasional semua organisasi yang bernafaskan kebangsaan tetap penting. Kita perlu menjaga organisasi ini supaya tetap punya manfaat. Dari sudut idelisme KNPI itu harus dijaga. Untuk kepentingan ekonomi dan politik tidak terlalu. Politik dalam arti ideologi, ya. Kalau pertimbangan ekonomi tidak juga. Apakah berita ini akan menghasilkan dampak iklan, misalnya. Jadi lebih pada dua hal tersebut. Karena banyaknya wartawan yang dari mantan aktivis. Idealisme wartawan ada pada tingkat wartawan untuk tingkat atas tidak terlalu tertarik. Meskipun Andi Mallarangeng sebagai Menpora dari Partai Demokrat, tidak serta merta membuat KNPI serta merta memuat KNPI. Jurnal Nasional ke Susilo Bambang Yudhoyono, iya tetapi kalau ke Demokrat, ngak. Kalau mengusung gagasan Susilo Bambang Yudhoyono iya. Politik membawa KNPI ke demokrat, tidak ada.

8. Adakah karakter khas Jurnal Nasional /dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?

Menyerukan mereka untuk bersama. Melakukan rekonsiliasi. Kalau koran-koran lain satu mengangkat satu kelompok di sini ngak. Jurnal Nasional lebih ke kiri tengah. Nasionalis. Model-model sosialisme Indonesia yang bisa berdialog dengan kelompok kanan dan kiri.

TRANSKRIP WAWANCARA REPUBLIKA

Nara sumber : Redaktur Nasional Republika, E.H. Ismail
Hari/tanggal : Jumat, 1 Juni 2012,
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : Kantor Republika, Jalan Warung Buncit Raya,
Jakarta Selatan

9. Bagaimana Kompas memandang konflik KNPI 2008-2011?

Republika memandang konflik KNPI sama seperti konflik masyarakat atau organisasi kepemudaan lain. Cuma yang justru menjadi masalah adalah ketika KNPI menjadi induk organisasi di kepemudaan. Dia yang menjadi induk organisasi induk pemuda se Indonesia. Ibarat kata ini konflik di level pusat. Kalau bicara pemerintahan ada konflik di kabupaten, provinsi, dan negara. Ini yang konflik negara. Konflik di KNPI ibarat konflik di negara. Kita melihat konflik KNPI seperti itu kerangkanya. Saya yang terutama menulis konflik KNPI. Inilah yang mendasari saya menulis tentang konflik KNPI. Ini penting bagi ini. Ini yang berkonflik di level negara.

10. Apakah dari sudut pandang tersebut KNPI 2008-2011 layak menjadi berita?

Dari sudut pandang itulah konflik KNPI menjadi layak untuk menjadi berita. Apalagi bukan ingin mendikotomikan koran pusat dan daerah. Repepublika, seperti Kompas, Media Indonesia, Jurnal Nasional secara sekup penyebaran (*spreading*) nasional. Makanya KNPI menjadi berbeda jika yang ribut organisasi kepemudaan Sumatera, Kalimantan atau KNPI di daerah, maka nilai berita berbeda. Untuk itu konflik KNPI ini menjadi untuk diberitakan di Republika.

11. Apakah Republika memandang atau menemukan KNPI 2008-2011 sebagai konflik internal atau ada campur tangan negara/kekuasaan dalam KNPI 2008-2011?

Pandangan saya, untuk konflik KNPI apakah konflik internal atau campur tangan kekuasaan, saya tidak melihat atau menemukan adanya konflik KNPI 2008-2011 adanya campur tangan negara atau kekuasaan. Saya tidak memiliki bukti otentik. Bukan berarti takut menyimpulkan ada intervensi kekuasaan atau negara. Konflik ini kebetulan terjadi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seingat saya ada dua Menteri Pemuda Olahraga. Perbedaan pendekatan Adhyaksa Dault dan Andi Mallarangeng sangat terasa. Karena itu konflik ini berdampak berbeda bagi perjalanan KNPI sangat berbeda. Siapa yang berkonflik Ahmad Doli Kurnia dan Aziz Syamsudin. Dari hasil wawancara sangat terasa ada kedua-duanya ada tarik menarik kepentingan politik. Kalau konflik politik berarti ada lembaga negara yang terlibat. Ibarat ada angin bertiup. Angin terasa tapi sulit untuk menemukannya. Kalau secara tegas mengatakan ada tidaknya konflik KNPI turut campur tangan kekuasaan, saya tidak menemukannya. Indikasinya dua Menpora yang membawahi KNPI langsung Adhyaksa Dault dan Andi Mallarangeng yang berada di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pendekatannya berbeda. Ini yang membuat ada kepentingan politik berbeda. Aziz dengan gerbongnya dari Golkar, Doli juga ada Akbar Tanjung dan lain-lain.

12. Bagaimana Republika mengkonstruksi konflik KNPI 2008-2011 menjadi sebuah berita yang layak dimuat?

Sebagai koran atau media, Republika pasti menjaga jarak atau independensi. Republika akan menjaga kedekatan yang sama terhadap narasumber, termasuk dalam konflik KNPI, Aziz dan Doli. Kita tidak berpihak ke manapun. Tetapi saat Aziz melakukan monver atau

pernyataan publik, tentu harus dibarengi dengan komentar dari pihak berseberangan. Celakanya memang pernah kejadian menurunkan versi Aziz tanpa suara Doli, tetapi itu tidak dalam satu penayangan. Besoknya ada komentar Doli. Kita tetap menjaganya. Itu konstruksi yang dibangun di *Republika*. Ini bukan hanya konflik KNPI tetapi semua wartawan *Republika* dilatih untuk menjaga independensi atau menjaga jarak dengan yang berkonflik.

13. Sebagai koran yang diasumsikan koran umat Islam, apa kepentingan *Republika* memuat berita konflik KNPI 2008-2011?

Kepentingan kita sudah jelas seperti yang saya katakan di atas. Ini induk organisasi pemuda yang membawahi seluruhnya. KNPI tidak membedakan organisasi Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Ketika ini bermasalah ini akan berdampak pada organisasi yang berbasis Islam, minimal dalam pertarungan ide. Pemuda Masjid dan beberapa organisasi Islam lain. Itu menjadi penting karena kita memberikan peluang bagi pemuda Islam sebagai pasar pembaca kita untuk menyuarakan atau ide mereka untuk menyelesaikan konflik ini. Organisasi pemuda Islam bisa memberikan solusi alternatif dalam kehidupan berorganisasi. Lebih luas lagi dalam kentingan berbangsa dan bernegara. Ini penting untuk kita turunkan berita-berita KNPI

14. Adakah pertimbangan ekonomi, politis, ideologis, atau idealisme dalam menulis dan memuat konflik KNPI 2008-2011?

Untuk kepentingan ekonomi saya tidak mengerti. Apakah pemuatan berita KNPI bisa secara langsung meningkatkan oplah *Republika*? Untuk kepentingan politik dan idealisme ini adalah wahana yang diberikan *Republika* kepada organisasi pemuda yang

berbasis Islam untuk memberikan tawaran untuk menyelesaikan konflik. Ini yang mendasari pemuatan berita konflik KNPI.

15. Adakah karakter khas Republika dalam menulis konflik KNPI 2008-2011?

Kita memiliki satu pakem. Biasanya kedua kubu yang berkonflik selalu mengedepankan ego dan merasa yang paling benar. Namun biasanya bahasanya sangat sarkas. Ciri khas adalah kita mengemas bahasanya dalam menulis konflik. Jangankan KNPI dalam konflik yang sangat sensitif, misalnya, Palestina versus Israel, Poso, Ambon dengan bahasa yang santun dan tidak provokatif salah satu pihak. Misalnya, kubu Aziz bla..bla..bla... yang sangat kasar. Republika akan membahasaka ulang dengan yang tidak vulgar dengan pilihan kata yang tidak kasar.



Dudi Iskandar adalah putra sulung dari pasangan (alm) Badrudin Saleh dan Hadiatin. Ia dilahirkan di Bandung, 5 Maret 1972. Strata satu diselesaikan pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 1996, dengan predikat *cum laude*. Program magister dirampungkan pada Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta, dengan spesialis *political communication*.

Selama 10 tahun menjadi wartawan di berbagai media cetak dan *online*. *Media Indonesia* (Oktober 2001- November 2007), *Koran Jakarta* (Desember 2007-Maret 2010), dan *beritasatu.com* (Juni-Juli 2010). Sebelum dan sesudah menjadi wartawan, aktivis HMI era 1990-2000 ini, produktif menulis di berbagai media cetak. Puluhan tulisan dimuat di *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Seputar Indonesia*, *Sinar Harapan*, dan *Pikiran Rakyat*.

Enam buah buku yang sudah ditulis dan dieditnya. Yakni, *Rekonstruksi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI* bersama Andito (1998), *Kajaiban di Tanah Suci saat Haji dan Umrah* (2004), *Haji ; Antara Aroma Bisnis dan Tarikan Spiritual* (Editor) (2005), *Menggapai Demokrasi; Jejak Politik HR Syaukani* bersama Hery Susanto dan Ali Amran Hasibuan (2006), dan *Perjalanan Sebuah Bangsa; Catatan 80 Tokoh Nasional* (2008) bersama Dwi Agus Susilo

SARSU, 22 NOVEMBER 2008

Wapres Pertemuan Dua Pengurus KNPI

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertemukan dan minta komitmen dua kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (20/11). Kepada kedua kubu KNPI, Wapres menawarkan kongres luar biasa untuk mengakhiri konflik dan tawaran diterima keduanya. Dua pengurus dengan pendukungnya yang diterima Wapres adalah Aziz Syamsuddin (versi kongres Bali) dan Ahmad Dolly Kurnia (versi kongres Ancol). Kedua kubu lantas diminta komitmennya oleh Wapres untuk menyelesaikan perpecahan KNPI. "Sebelum awal tahun 2009, masalah harus selesai," ujar Wapres. (INU)

DUMAI, 27 FEBRUARI 2009

KEJAHATAN

Massa Rusak Gedung KNPI

JAKARTA, KOMPAS — Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dirusak puluhan orang tidak dikenal, Kamis (26/2) pagi. Berdasarkan pantauan di lokasi, dua pintu kaca hancur, tiga jendela besar jebol, dan dua jendela berlubang akibat lemparan batu, kayu, serta benda keras yang dilakukan kelompok pemuda tidak dikenal itu.

"Lima aktivis pemuda di KNPI terluka akibat tindakan itu. Mereka terkena pecahan kaca dan ada yang luka karena dipukuli," kata Ketua Umum KNPI Ahmad Doli Kurnia.

Anang, tukang ojek di lokasi, mengatakan, sekitar pukul 10.15 ada gerombolan orang mendatangi Gedung KNPI. "Tahu-tahu terjadi keributan dan mereka merusak Gedung KNPI. Motor

yang diparkir di sana dirobohkan oleh gerombolan itu. Setelah polisi dan petugas keamanan datang, mereka berpecah melarikan diri," kata Anang.

Polisi menangkap 10 orang perusak gedung di belakang kompleks GOR Soemantri Brodjonegoro dan Apartemen Taman Rasuna. Petugas keamanan Rasuna Epicentrum membantu polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menangkap para perusak.

Para pelaku bungkam ketika ditanya identitas dan motif merusak gedung tersebut. Mereka kemudian diangkut dengan mobil bak milik Satpol PP Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ajun Komisaris Sunaryo dari Polsek Setiabudi menerangkan, para tersangka diperiksa lebih lanjut di Polres Jakarta Selatan.

(ONG)

JUMAT, 27 FEBRUARI 2009

Kantor KNPI Dirusak



KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas polisi mengamankan barang bukti sepeda motor yang dirusak massa dalam aksi penyerangan Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/2). Penyerangan tersebut diduga akibat konflik internal di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia.

YOGYAKARTA, 8 NOVEMBER 2010

Aburizal Bakrie Minta KNPI Rekonsiliasi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta agar perpecahan dalam kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia diselesaikan melalui rekonsiliasi atau mengadakan kongres luar biasa. Hal itu dikatakan Aburizal Bakrie saat membuka Rakernas II Pemuda/KNPI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (5/11) malam. Kepengurusan KNPI terpecah dalam dua kubu, yaitu kubu Aziz Syamsuddin (versi Kongres Bali) dan kubu Ahmad Dolly Kurnia (versi Kongres Ancol). Aburizal Bakrie mengatakan, KNPI merupakan calon pemimpin masa depan, karena itu KNPI harus bersatu. Sewaktu menjabat Menko Kesra, Aburizal Bakrie memang mengeluarkan surat bahwa kepengurusan KNPI yang sah adalah Aziz Syamsuddin. "Namun, ada kepengurusan KNPI yang lain. Saya minta cuma ada satu KNPI. Kalau perlu, adakan kongres luar biasa, tapi itu diserahkan pada KNPI," katanya. (WAD)

Jakarta, 8 Desember 2011

Tidak Ada Lagi Dualisme di KNPI

Dalam Kongres Pemuda/KNPI XIII di Jakarta, 24-28 Oktober 2011, muncul 11 bakal calon ketua umum DPP KNPI. Dari 11 bakal calon ketua umum DPP KNPI, hanya satu orang yang memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 20 persen suara. Dengan demikian, Presidium mengesahkan Taufan Eko Nugroho Rotorasiko sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2011-2014 dengan perolehan 68 suara. Pelantikan pengurus akan dilakukan 28 November. Sebelumnya, pada periode 2008-2011 terdapat dualisme kepemimpinan DPP KNPI yang dipimpin Aziz Syamsuddin dan Ahmad Doli Kurnia. "Sekarang masih ada sembilan Dewan Pimpinan Daerah KNPI yang juga mengalami dualisme kepemimpinan, tetapi akan segera kami atasi," kata Taufan Eko Nugroho Rotorasiko di Jakarta, Senin (7/11). (LOK)

Kemempora Diminta Segera Selesaikan Dualisme KNPI

Jakarta | Jurnal Nasional
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemempora) diharapkan segera menyelesaikan masalah kepemudaan Indonesia dengan tidak membiarkan konflik internal di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) berlarut-larut.

Ketua Umum DPP KNPI Aziz Syamsuddin mengatakan saat ini muncul kesan kuat di kalangan organisasi pemuda di seluruh Indonesia bahwa pemertintah sengaja memperpanjang konflik di tubuh organisasi kepemudaan di Indonesia. "Harus ada ketegasan, misalnya semua harus bersatu dalam forum pemuda nasional," ujar Aziz di Jakarta, kemarin (19/6).

Menurut Aziz, sikap tegas pemertintah sebenarnya pernah ditunjukkan Kemempora saat

dipimpin Adhyaksa Dault. Saat itu, secara tegas Adhyaksa menyatakan kepengurusan yang sah adalah yang dipimpin oleh Aziz.

Aziz menyatakan apabila pemertintah memang ingin pemuda menjadi satu pilar utama pembangunan nasional, sikap tegas serta solusi pemertintah untuk menyelesaikan masalah di internal KNPI diperlukan. "Bila tidak, risiko lebih besar slip menghadang yakni peran serta pemuda dalam pembangunan tak bisa berjalan," lanjut Aziz.

Hal senada disampaikan Ketua DPD KNPI Jawa Tengah Novita Wijayanti. Ia mendesak Kemempora agar segera mengambil langkah serius dan bijaksana menyelesaikan sengketa ini.

"Kami KNPI jaring meminta pemertintah cq. Kemempora untuk

Novita

Seperti diketahui, posisi di DPP KNPI berawal dari konflik yang dilakukan secara sepihak di Ancol, Jakarta Utara, pada 25-28 Oktober 2009, yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai ketua umum DPP KNPI. Kongres KNPI yang sah telah dilakukan ulang pada 2 November 2009 dan menetapkan Aziz Syamsuddin sebagai ketua umum. Kepengurusan Aziz ini didukung oleh pemertintah yang diwakili oleh Kemempora di bawah kepemimpinan Adhyaksa Dault sebagai Kemempora periode 2004-2009.

Keputusan ini lalu digugat secara hukum oleh pihak Doli Kurnia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Juni tahun lalu, Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan tersebut.

Namun pihak Aziz lalu mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. "Ini artinya secara hukum belum ada keputusan tetap tentang kepengurusan KNPI yang sah. Pihak Doli juga tak bisa seandainya menngaku-aku bahwa status dia sudah berkekuatan hukum tetap," kata Aziz.

Menurut Aziz, inisiatif untuk mempersatukan kembali pemuda Indonesia di bawah satu kepengurusan sudah dilakukan. Dalam pertemuan yang dipelopori oleh Kemempora, ada sejumlah kesepakatan yang dilakukan antara kubu Aziz dan kubu Doli.

"Tapi belakangan pihak Doli mengingkari sejumlah kesepakatan yang sudah dirandatangan," ujar Aziz.

■ Allyudin Sofyan

KONFLIK DI DPP KNPI BERAWAL DARI KONGRES YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK DI ANCOL, JAKARTA UTARA, PADA 25-28 OKTOBER 2009, YANG MENUNJUK AHMAD DOLI KURNIA SEBAGAI KETUA UMUM DPP KNPI.

mengambil langkah tegas dalam menyikapi perselisihan pemuda yang masih berjalan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Kalau bisa dengan melakukan aksi penyelesaian dualisme di KNPI ini," ucap

Senin 20 Juni 2011

Menpora Diminta Atasi Konflik KNPI

Jakarta | Jurnal Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengatasi konflik yang terjadi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang terus berlarut-larut. Menurut politisi PDI Perjuangan ini harus ada kompromi dan titik temu dari kedua kubu kepemimpinan KNPI hasil Kongres Bali Aziz Syamsuddin maupun kongres Ancoq Ahmad Doli Kurnia kalau mau membangun dan membesarkan organisasi KNPI.

"Tugas Menpora Andi Mallarangeng untuk menyelesaikan permasalahan ini bukan DPR. DPR tidak memihak ke kiri atau kanan," kata Utut kepada wartawan di Jakarta, kemarin (5/7).

Utut menyarankan agar kubu Aziz dan Doli bertemu dan berkompromi melalui

Menpora sebagai pihak pengengah. "Solusi dari Menpora menawarkan kongres bersama KNPI tapi katanya di AD/ARTI tidak dikenal istilah kongres bersama. Saya menyarankan kedua kubu diakomodasi tidak bisa ada yang dimenangkan atau dikalahkan. Karena ini bukan persoalan hidup dan mati, tapi organisasi kepemudaan. Tidak baik konflik terus. Kalau ribut terus bisa KNPI tidak dapat anggaran, padahal anggaran kan penting untuk menggerakkan KNPI di daerah. Harus diingat KNPI itu kawah candradimuka bagi pemuda," ujarnya.

Sejumlah pemimpin organisasi kepemudaan pun mulai berinisiatif untuk mengakhiri konflik tersebut dengan baik. Devi Andita, Ketua Umum Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (GM-FKPP) mengatakan, seharusnya ma-

ning-masing pihak bertikai tak merasa bahwa KNPI adalah milik mereka secara pribadi.

Bersama sejumlah pemimpin organisasi kepemudaan lainnya, Devi mendesak pemerintah segera membentuk Komite Normalisasi Pemuda Indonesia yang bertugas untuk mempersiapkan kongres nasional pemuda Indonesia. Sejumlah OKP yang turut mendukung pembentukan komite tersebut di antaranya Yedi Dyah dari Satuan Pemuda Pancasila dan Lingga dari Pemuda Panca Marga.

"Kami baru saja bertemu Menpora Andi Mallarangeng untuk menyampaikan ide tersebut. Menpora sepakat dan kami berharap kongres pemuda bisa dilaksanakan sekitar Oktober mendatang," kata Devi.

Dengan adanya kongres nasional tersebut, diharapkan semua pihak terkait kepemudaan bisa bersatu padu me-

nanggalkan ego pribadi demi kepentingan pengembangan peran serta pemuda dalam pembangunan nasional. "Sudahlah cukup dengan konflik, teralalu banyak keburukannya untuk KNPI bila dibiarkan terus," pintanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Muir mengatakan, BK DPR tidak akan menindaklanjuti laporan Ahmad Doli Kurnia atas dugaan pelanggaran kode etik Aziz Syamsuddin. Pasalnya, BK bukar tempat untuk mengadakan masalah pribadi terkait perebutan kursi pemimpin sebuah organisasi.

"Urusan itu tak ada dugaan pelanggaran etik. Hanya urusan internal KNPI. BK tidak akan urusi masalah itu. Itu urusan masing-masing soal siapa yang dilakui pemerintah," kata Nudirman.

■ Aliyudin Sofyan

Revisi 6 Juli 2011



KNPI Sumbar Dukung KNPI Ahmad Doli Kurnia

Padang | Jurnal Nasional

PENGURUS KNPI Sumbar yang baru bergeming atas dualisme KNPI Pusat antara Ahmad Doli Kurnia dengan Aziz Syamsuddin, Ketua DPD KNPI Sumatera Barat (Sumbar) Adib Aiffiki menegaskan sikapnya bukatnya mendukung Doli selaku ketua Umum DPP KNPI yang sah.

"Kami tidak mau terbetot oleh dualisme kepengurusan dan terpecah dengan kubu-kubuan," ujar Adib saat jumpa pers perdana kepengurusan DPD KNPI Sumbar masa bakti 2011-2013, Senin (18/7) di Padang.

Sikap bulat KNPI Sumbar itu sebagai wujud Sumbar tidak menginginkan dunia kepemudaannya terbelah. "Kami ingin satu pemuda sehingga itu sikap kami bulat Ahmad Doli Kurnia adalah ketua umum sah DPP KNPI," ujar Bendahara DPD KNPI Sumbar Nurkholis menekankan.

Pada bagian lain Ketua Umum DPD KNPI Sumbar ini juga merencanakan pelantikan kepengurusan lengkap DPD KNPI Sumbar 23 Juli besok. "Ada 138 personel lengkap DPD KNPI Sumbar yang Insya Allah akan dikukuhkan langsung oleh Ketua pada 23 Juli ini," ucapnya.

Adib juga memastikan gemuknya kepengurusan meredakan pemuda Sumbar satu di bawah payung KNPI yang dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia. "Ini bukti bahwa kami solid mendukung Ketua Umum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia, tidak yang lain," ungkapnya.

Sementara sekretaris DPD KNPI Sumbar Wiryu Fansuri juga membeberkan rangkaian kegiatan yang pelantikan dan HUT KNPI Sumbar mulai dari sambako untuk rakyat, sampai ke pemberian Pemuda Award 2011.

Hentikan Dualisme KNPI

Jakarta | Jurnal Nasional

SELURUH organisasi kepemudaan (OKP), *stakeholder* utama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) harus berinisiatif dan proaktif menjembatani konflik dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi induk kepemudaan itu menjelang kongres, Oktober ini. Jika konflik dualisme itu terus berlanjut dan kongres terbelah dua, KNPI berada di ambang kehancuran.

"OKP harus mendorong kedua kubu duduk bersama untuk memastikan agar hanya ada satu kongres KNPI," kata Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arif Muthopa kepada *Jurnal Nasional*, Selasa (13/9).

Arif menjelaskan, dalam mekanisme organisasi KNPI, kongres diputuskan dalam sidang Majelis Pertimbangan Pemuda (MPP). Di situ, dua kepemimpinan KNPI yang bertikai jelas mempunyai MPP masing-masing. "Jadi, OKP harus tegas menolak keputusan MPP dari salah satu kubu kepemimpinan. Mereka harus mendorong agar kedua MPP ini duduk bersama dalam membuat keputusan terkait kongres," ujar pria yang memimpin PB HMI periode 2008-2010 itu.

Konflik dualisme kepemimpinan KNPI terus berlarut-

larut sejak 2008 antara kubu kepemimpinan KNPI hasil kongres Bali yang memilih Aziz Syamsuddin dan kongres Ancoi di bawah kendali Ahmad Doli Kurnia. Dualisme kepemimpinan ini menyebabkan organisasi induk pemuda yang berdiri pada 23 Juli 1973 itu tak kunjung selesai.

Arif melihat, saat ini sudah ada kegelisahan dari OKP karena konflik ini membuat KNPI kehilangan tuah. Namun, keresahan saja tidak cukup.

Untuk mengatasi persoalan harus mengambil langkah nyata dengan spirit persatuan. "Idealnya memang semua OKP berkumpul menyamakan sikap. Jika itu tidak memungkinkan, mereka bisa menyampaikan sikap masing-masing lewat media. Langkah ini yang belum terlihat," ucap Arif.

Ketua Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Novia di sepakat jika "bola panas" konflik KNPI harus tuntas di arena satu kongres. Kedua kubu yang bertikai harus duduk bersama dan berpikir visi jangka panjang bagi kepemudaan. Sebagai salah satu anggota KNPI, dia terus menjalin komunikasi dengan OKP untuk menyatukan sikap. "Mudah-mudahan upaya dari kawan-kawan OKP untuk mewujudkan Kongres Persatuan bisa terwujud." ■ Ahmad Muhajir

RAW. 14 SEPT 2011

KNPI Segera Bahas Proses Penyatuan

Jakarta, Jurnal Nasional

SETELAH sekian lama dilanda perpecahan internal, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) siap menyatukan semua faksinya. Persiapan awal penyatuannya dibahas dalam forum Majelis Permusyawaratan Pimpinan (MPP) KNPI yang akan dibuka Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Menurut jadwal, forum MPP KNPI akan berlangsung pada 16-17 September di Hotel Sheraton Media, Jakarta. Agenda utamanya adalah mempersiapkan kongres bersama dua kubu DPP KNPI selambat-lambatnya pada 28 Oktober 2011.

"Peserta forum MPP KNPI ini adalah para ketua organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) serta ketua DPD KNPI se-Indonesia," ujar Ketua Umum DPP KNPI versi Kongres Bali, Aziz Syamsuddin, kepada wartawan, di Gedung DPR, Kamis (15/9).

Dijelaskannya bahwa MPP tersebut merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kedua setelah kongres dalam organisasi KNPI. Menurutnya, sesuai dengan AD/ART KNPI, maka MPP wajib digelar sebelum penyelenggaraan kongres.

Aziz yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, penyelenggaraan kongres bersama KNPI tersebut selambat-lambatnya 28 Oktober mendatang sudah

**PENYELENGGARAAN
KONGRES BERSAMA
KNPI TERSEBUT
SELAMBAT-LAMBAT-
NYA 28 OKTOBER
MENDATANG.**

menjadi kesepakatan antara dirinya dengan kubu Dolly Kurnia dan disaksikan oleh Menpora Andi Mallarangeng pada 4 April 2011 lalu.

"Kita ingin menyatukan kongres dan untuk itu kita lakukan musyawarah sebetulnya. Saya juga mengajak semua elemen yang ada di KNPI untuk merumuskan bagaimana organisasi ini di masa mendatang. Saya juga tidak akan maju kembali sebagai ketua KNPI," tandasnya.

Bahkan, ia menambahkan, apabila berhasil dicapai kesepakatan diantara kedua pihak maka pihaknya juga siap untuk mencabut pernyataan banding atas gugatan yang telah didaftarkan terkait dualisme kepemimpinan KNPI.

"Jadi walaupun masih ada proses hukum yang sedang berjalan di tingkat banding, kita akan musyawarahkan agar tidak sampai ke kasasi," demikian Aziz.

■ Aliyudin Sofyan

PARISY, 17 SEPT 2011

Ketua MPR Apresiasi Rencana Rekonsiliasi KNPI

Jakarta: Jurnal Nasional
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas mengapresiasi komitmen kelompok pemuda nasional untuk berekonsiliasi dan mendesak Pemerintah untuk sepenuhnya mendukung komitmen itu. Hal itu diungkapkan Taufiq saat membuka Musyawarah Pimpinan Pemuda (MPP) DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), di Jakarta, Jumat (16/10).
"Melalui MPP ini saya berharap mampu menjadi motor de-

mokrasi dan menjaga persatuan nasional. Saya harap melalui demokrasi sesuai jadwal sehingga ada kaderisasi termasuk di KNPI," kata Taufiq.
Menurut politisi senior PDI Perjuangan ini sudah saatnya KNPI memberi contoh dalam memelopori persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk persatuan pemuda. Tidak hanya sekarang dan di masa mendatang. Pada kesempatan itu, Taufiq juga mengingatkan para pemuda semangat sumpah pemuda/28

Oktober yang sebentar lagi akan diperingati. "Takkan ada kita disini tanpa ada sumpah pemuda itu dibuat oleh pemuda-pemuda kita, awalan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanpa organisasi mereka bersatu, dan luar biasanya mereka berkumpul di antara 20-21 tahun," kata Taufiq mengingatkan.
Dalam pembukaan itu, hadir sejumlah pejabat tinggi di antaranya Wakil Ketua MPR dan anggota dewan pembina Partai Demokrat Mellani Lemena Su-

baril, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Soesro, serta para mantan ketua KNPI seperti Tjahjo Kumolo, yang saat ini menjabat Sekjen PDIP dan Aulia Rahman.
Ketua DPP KNPI, Azis Syamsuddin mengatakan, setelah sekian lama dilanda perpecahan internal, KNPI siap menyatukan semua faksinya di mana persiapan awal penyatuannya dibahas dalam forum MPP KNPI.
Dalam forum yang berlangsung pada 16-17 September di

Hotel Sheraton Media, Jakarta, tersebut, peserta mempersiapkan kongres bersama dua kubu DPP KNPI selambatnya pada 28 Oktober 2011.
Para peserta forum MPP KNPI adalah para ketua dari 74 organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) se-Indonesia, serta ketua DPD KNPI se-Indonesia, ujar Azis Syamsuddin.
"Forum MPP ini merupakan landasan menuju kongres bersama pemuda. Di forum itu kita saling memberi serta mendengar

pandangan daerah-daerah menentukan kapan dan kongres bersama KNPI dilaksanakan serta siapa yang bisa menjadi peserta," ujar Syamsuddin.
"Selanjutnya setelah MPP berhasil menyepakati dan waktu penyelenggaraan kongres bersama KNPI segera dibentuk panitia kongres (SC) panitia pelaksana (SC) serta mengesahkan aturan main kongres. Sementara Wakil Ketua X DPR bidang pem-

Isiliasi KNPI

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Soesro, serta para mantan ketua seperti Tjahjo Kumolo, saat ini menjabat Sekjen dan Aulia Rahman.
Ketua DPP KNPI, Azis Syamsuddin mengatakan, setelah sekian lama dilanda perpecahan internal, KNPI siap menyatukan semua faksinya di mana persiapan awal penyatuannya dibahas dalam forum MPP KNPI.
Dalam forum yang berlangsung pada 16-17 September di

Hotel Sheraton Media, Jakarta, tersebut, peserta mempersiapkan kongres bersama dua kubu DPP KNPI selambatnya pada 28 Oktober 2011.
Para peserta forum MPP KNPI adalah para ketua dari 74 organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) se-Indonesia, serta ketua DPD KNPI se-Indonesia, ujar Azis Syamsuddin.
"Forum MPP ini merupakan landasan menuju kongres bersama pemuda. Di forum itu kita saling memberi serta mendengar

pandangan daerah-daerah untuk menentukan kapan dan di mana kongres bersama KNPI itu dilaksanakan serta siapa saja yang bisa menjadi peserta," ujar Azis Syamsuddin.
"Selanjutnya setelah forum MPP berhasil menyepakati tem- pat dan waktu penyelenggaraan kongres bersama KNPI, maka segera dibentuk panitia pengarah (SC) panitia pelaksana (OC) kongres itu serta menyusun sejumlah aturan main kongres." Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pemuda dan

kedelahraan, Utut Adianto mengatakan pibahnya sangat mengapresiasi komitmen kelompok pemuda nasional untuk bersatu kembali dalam wadah yang sama demi pembangunan nasional. Utut berharap ini menjadi titik tolak terbaru untuk menjalin peran pemuda nasional dalam pembangunan bangsa.
"Itu yang selalu kita harapkan, bagaimana agar bisa KNPI bersatu. Kita sangat mengapresiasi langkah baru ini," kata Utut. ■ Aliyudin Sofyan

PLASW, 26 OKT 2011

Kandidat Ketua Umum KNPI Sampaikan Gagasan

Jakarta | Jurnal Nasional
KOMITE Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar Kongres Bersama pada 24-28 Oktober 2011 di Hotel Sahid, Jakarta. Sebanyak 14 calon ketua umum dikabarkan maju dalam kongres yang ke-13 ini.

Salah satu kandidat yaitu Arip Musthopa menyatakan sudah menyiapkan konsep perubahan agar seluruh pemuda bisa solid dan bersatu untuk bangsa. Arip mengatakan, KNPI sebagai aset bangsa sudah seharusnya menjadi perekat dan pelayan untuk kesejahteraan pemuda.

"Sudah menjadi kewajiban KNPI menjadi pelayan pemuda demi masa depan," kata mantan Ketua Umum PBHMI ini saat jumpa pers di Hotel Sahid, Selasa (25/10).

Arip melanjutkan, KNPI harusnya ditafsirkan secara positif sebagai lembaga yang mampu menjadi pintu masuk pemuda dalam menuangkan ide-ide dan kreativitas tanpa membedakan kelas dan golongan. "Artinya dengan keterbukaan yang ada saat ini maka kita sebagai pemuda harus mempunyai kesadaran untuk kepentingan bangsa dan negara," ucapnya.

Sebagai tokoh muda yang pernah memimpin PBHMI, Arip menyatakan paham roh dari perjuangan KNPI. "Jadi tidak benar kalau saya disebut tidak paham KNPI karena saat saya aktif di HMI dari tingkat komisariat dan cabang hingga memimpin PBHMI. Saya paham betul roh dari garis perjuangan KNPI," ungkapnya.

Ke depan kata Arip, KNPI harus mampu mengambil peran penting dalam perubahan bangsa.

"Perubahan dalam bentuk sosial, politik, ekonomi, hu-

kum, dan kesejahteraan secara menyeluruh harus ada di tangan KNPI sebagai wadah pemuda Indonesia," tuturnya.

Saat ditanya berapa dukungan yang sudah dikantongi, Arip dengan nada merendah menyatakan, kalau suara dukungan untuknya datang dari OKP yang menginginkan perubahan KNPI ke depan.

Teruskan Tradisi

Terpisah, calon ketua umum KNPI lainnya, Taufan EN Rotorasiko mengatakan saat ini momentum yang tepat bagi kaum muda melakukan regenerasi kepemimpinan bangsa.

Karena itu, apabila dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di KNPI, Taufan hanya ingin menjabat satu periode saja. "Jika saya terpilih menjadi Ketua Umum KNPI, saya akan meneruskan tradisi *founding fathers* KNPI selama ini yaitu memegang jabatan satu periode saja," kata Taufan di Jakarta, Selasa (25/10).

Taufan yang akrab dipanggil TEN menjelaskan, KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan mesti menempatkan diri sebagai inkubator kepemimpinan pemuda menuju kepemimpinan nasional. Dengan begitu akan lahir calon pemimpin bangsa yang terpadang di pentas internasional.

"Ini juga momentum yang tepat bagi kebangkitan pemuda Indonesia di dunia internasional," ucapnya.

Taufan yang juga Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna ini menambahkan kongres persatuan KNPI tahun ini adalah pijakan keutuhan kembali wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan.

■ Rusman/
Andhika Tirta Saputra

Ketua DPR Prihatin Politik Uang di KNPI

JUMAT
28 Okt
2011

Jakarta | Jurnal Nasional

KETUA DPR RI Marzuki Ale menyatakan prihatin terhadap praktik politik uang dalam Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) II di Jakarta, 24-27 Oktober 2011.

Saya prihatin pada generasi muda saat ini yang sudah terkontaminasi uang, kata Marzuki Ale pada diskusi "Dialektika, Capres Muda atau Jadu" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Menurut Marzuki, dirinya menaruh harapan besar pada generasi muda untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menambahkan, dirinya mengajak generasi muda untuk idealis dalam calon Ketua Umum KNPI. Namun ia merasa prihatin karena generasi muda saat ini sudah tidak idealis dan telah terkontaminasi uang.

Dalam menghadapi kegiatan sehari-hari berorientasi pada uang, kata dia pada Kongres KNPI saat ini, katanya.

Menurut dia, praktik politik uang itu sudah tidak bisa dibendung. Saya berusaha mengajak membangun idealisme tapi itu semua hilang. Generasi muda saat ini tidak kuat melawan kekuatan uang. Itu fakta, ujar Marzuki.

Marzuki menyatakan prihatin dengan kondisi pemuda saat ini. Ia menambahkan, bagaimana mau menyerahkan kepercayaan kepada generasi muda untuk membangun masa depan, kalau pemuda-pemudanya sudah terkontaminasi uang.

Ia menambahkan, di saat ia menaruh simpati pada organisasi pemuda yang menjadi wahana proses regenerasi, dan tidak ada kaitannya dengan siapa pemuda yang telah berprestasi untuk Dey.

011

DUMATI, 9 SEP 2011

KNPI Akomodasi Semua Potensi Pemuda

Jakarta | Jurnal Nasional

KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Taufan Eko Nugroho Rotorasiko menyatakan, pengukuhan kepengurusan DPP KNPI masa bakti 2011-2014 ini merupakan terobosan politik dalam rangka mengakhiri dualisme kepengurusan di KNPI. Karena itu, kepengurusan KNPI yang ada sekarang bersifat akomodatif yang menghimpun semua potensi pemuda Indonesia.

"Saya berharap ke depan tidak ada lagi dualisme KNPI. KNPI itu hanya satu milik pemuda Indonesia. Memang ada tarik menarik dan konflik, tapi semua itu sudah kita lalui. Ibarat badai, konflik itu sudah berlalu dan sekarang hanya ada satu KNPI yang menyatukan semua potensi pemuda Indonesia," ujarnya di sela-sela pengukuhan kepengurusan DPP KNPI periode 2011-2014 di Balai Kartini Jakarta, Rabu (7/12) malam.

Hadir dalam acara pengukuhan itu Deputi I Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Alfitra Salam, mantan Menpora Adhyaksa Dault, mantan Ketua Umum KNPI Aulia Rahman, mantan Sekjen KNPI Mujib Rohmat, serta penyanyi kondang Iwan Fals yang membawakan lagu *Kesaksian dan Di Bawah Tiang Bendera*.

Menurut Taufan, dalam penyusunan kepengurusan DPP KNPI sekarang ini memang dilakukan selektif dan pembatasan usia di bawah 40 tahun, sehingga KNPI benar-benar menjadi organisasi pemuda yang kreatif dan inovatif serta menjadi *community of idea* bagi pemuda Indonesia.

Sedangkan dalam komposisi kepengurusan ada sekitar 400 pengurus yang terdiri dari 65 posisi ketua, 65 wakil sekjen, 65 wakil bendahara dan 65 departemen. "Kalau dari segi jumlah memang sudah optimal dan bersifat akomodatif dalam rangka mempersatukan semua elemen pemuda Indonesia dari berbagai OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda)," kata dia.

Taufan juga menjelaskan, KNPI ke depan harus mampu melahirkan gagasan besar dan menjadi *community of idea* bagi pemuda Indonesia dan benar-benar menjadi organisasi yang mandiri.

"KNPI ke depan harus mampu menjadi identitas dan jati diri pemuda, melakukan penguatan nasionalisme dan kebangsaan serta mengoptimalkan potensi pemuda dalam bidang kewirausahaan. Sehingga, KNPI bukan saja menjadi laboratorium kader bangsa, tapi juga menjadi wadah mempersatu bangsa dalam mempertahankan NKRI," ujarnya.

Menpora Andi Mallarangeng dalam sambutan melalui telekonferensi menyampaikan salam dan selamat dari Presiden SBY kepada seluruh jajaran pengurus KNPI yang baru dilantik. "Pak Presiden SBY menyampaikan selamat atas pengukuhan pengurus KNPI dan menyediakan waktu untuk menerima audiensi pengurus KNPI dalam membahas program pemuda ke depan. Saya pribadi juga menyampaikan selamat kepada Ketua Umum KNPI Taufan Rotorasiko yang sudah mempersatukan dualisme KNPI," ujar Menpora.

■ Aliyudin Sofyan/
Rhama Deny

Kabarkota

Kilas

Mayat Wanita Dibuang di Jalan

BEKASI — Sebuah lemari kayu berisi mayat wanita ditemukan di pinggir jalan di Kampung Parigi, RT 03/RW 04, Desa Cikind, Bantargebang, Bekasi, Kamis (26/2). Ada lima bekas sayatan berdegar di kepala wanita berusia sewen malarang ini.

Lemari kayu warna hijau itu pertama kali ditemukan oleh Ordi, warga sekitar yang saat itu akan mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Ia melihat mayat itu menggantung seperti motor selular putih GS-30 WIS. Dia terkejut melihat ada lemari tergeletak di pinggir jalan kecil yang sempit itu.

"Bismillah tidak pernah ada di atasnya di jalan ini," kata Ordi yang sebelumnya melapor ke lima RT setempat. Namun, Pak RT dan orang tua warga berunding datang ke lokasi. Namun, tak berani membuka lemari yang terkunci di lemari terhalah ada barang di dalamnya.

Warga berinisiatif menyoroti kejadian ini ke petugas Polsek Bantargebang. Setelah patroli datang ke lokasi dan membongkar lemari tersebut, di dalamnya ada sesak mayat wanita berambut hitam. Tubuh dia ada busa 40 tahun dengan tinggi badan 150 cm dan menggunakan celana jeans biru serta kaos putih. Menurut warga, seekor anjing putih pernah mereka lihat menggonggong di lokasi ini di jalan ke RS Putri Kencana Jati, Jakarta Timur, untuk diadukan. Kapelikan Kota Bekasi masih menyetujui di lokasi pembunuhan dengan menggunakan ering plastik. ■

radio guide

RADIO ONLY MEN FM

Pesta Generasi Musik Terkini Hadir di La Piazza

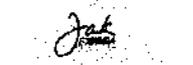
Pesta musik di radio 92,7 dan FM lokal tak ada artinya. Di awal Februari ini, dan FM kembali menggelar Pesta Generasi Musik Terkini (PGMT). Kali ini, acara akan digelar di La Piazza, Kelapa Gading, pada 25 Februari 2006.

Uniknya, PGMT kali ini dibuat lebih mewah dengan menghadirkan Dora, Pasha, dan Ordi sebagai band undangan. Dibantu juga oleh banyak band lainnya dari seluruh Jakarta. Selain itu, PGMT juga menghadirkan beberapa kelompok mahasiswa yang peduli akan lingkungan dengan menggelar kampanye. Acara ini sendiri dimulai sejak pukul 11 pagi hingga malam hari. ■

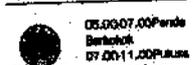
JADWAL MARAH



5.00-6.00	Radio 92.7
06.00-10.00	SENAMBAR PADI
10.00-11.00	DI SHOW
11.00-12.00	DI SHOW
12.00-13.00	DI SHOW
13.00-14.00	DI SHOW
14.00-15.00	MOST WANTED
15.00-16.00	MOST WANTED
16.00-17.00	GENAHOLE
17.00-18.00	GENAHOLE
18.00-19.00	GENAHOLE
19.00-20.00	GENAHOLE
20.00-21.00	GENAHOLE
21.00-22.00	GENAHOLE
22.00-23.00	GENAHOLE
23.00-01.00	GENAHOLE
24.00-01.00	Radio 92.7



06.00-10.00	Breakfast @ 101
10.00-14.00	7 in 4 Five Star
14.00-18.00	7 in 4 Five Star
18.00-20.00	Music @ 101
21.00-23.00	101 Music Party
23.00-01.00	101 Music Party



05.00-07.00	Wide Beach
07.00-11.00	Plaza with Miss Dora (Miss Suster)
11.00-13.00	Di (Show)
13.00-15.00	Di (Show)
15.00-19.00	Selamat Sore (Andri)
19.00-21.00	The Stage (Daud)
21.00-23.00	The Stage (Daud)



Dituntaski Polisi berjaga di depan Kantor Majelis Nasional Pemuda Indonesia (MNP) yang dirusak oleh sejumlah orang. Jakarta Pusat, Kamis (26/2). Pengrusakan kantor tersebut di duga akibat aksi demonstrasi internal di dalam organisasi itu.

Ada 47 Titik Rawan di Jalur Koridor VIII

Dilintas Polda Metro Jaya siap mem-back-up Pemprov DKI

JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya siap membantu Pemprov DKI dalam mengatasi 47 titik rawan kecelakaan di jalur busway koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni). Oleh karena itu, polisi siap membantu Pemprov DKI untuk mengamankan titik-titik rawan kecelakaan itu.

"Sebagai upaya pengamanan, kami telah menyertakan 400 personel yang akan bertugas dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komletaris Besar Condro Kurno, di Balai Kota, Kamis (26/2). Kurno menambahkan, sebanyak 200 personel yang bertugas sejak pukul 14.00-24.00 WIB. Menurut Condro, 400 personel ini akan bertugas untuk mengatur lalu lintas di 47 titik rawan kecelakaan tersebut. "Titik rawan itu kebanyakan terletak antara Lem-

pas Merah Kuning dan Lempu Merah Pas Pengantolan," katanya sesuai pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Titik rawan, tambahnya, seperti adanya kendaraan yang melambatkan laju menyulitkan laju berikutnya perampangan.

"Jadi ini, kepada para pengendara yang melintas di kawasan tersebut, kami mohon agar bisa berhati-hati dan jangan melakukan pelanggaran lalu lintas," kata dia. Selain itu, Kepala Bidang Manajemen dan Keamanan Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Akbar, mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan survei titik-titik rawan di koridor VIII yang menunjukkan tempat-tempat yang rawan kecelakaan.

Kantor KNPI Dirusak

JAKARTA — Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang terletak di Jl HR Rasuna Said, Kemuning, Jakarta Selatan, dirusak Selasa (26/2). Menakutkan, kerusakan yang terjadi di gedung KNPI, sebagian besar disebabkan oleh aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Aksi demonstrasi itu berlangsung dengan cepat. "Pelaku yang sebagian memukul benda-benda yang ada di dalam gedung itu, dan beberapa orang yang ada di dalam gedung itu, dan beberapa orang yang ada di dalam gedung itu, dan beberapa orang yang ada di dalam gedung itu," kata dia.

Warung Remang-remang Dibakar

Jaya Bupati Bogor, Rachmat Lailan, untuk memberantas praktik prostitusi di wilayahnya telah menggelar operasi pemusnahan warung remang-remang di Kampung Pinast, Desa Sukawati, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Selain dibongkar, petugas Perhubungan Masyarakat (LHM) Kecamatan Cileungsi juga membakar warung remang-remang itu.

Lokasi Pembuangan Sampah Dialihkan

BEKASI — PT Codang Tua Jaya akan mengalihkan pembuangan sampah dari zona 3 ke zona 5A. Pengalihan zona yang dilakukan oleh pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, ini akan dimulai Jumat (27/2).

Bagus menambahkan, PT Codang Tua Jaya sebagai pengelola lahan TPST Bantargebang tidak memiliki kewajiban dalam melakukan pemantauan lingkungan. Di antaranya, menanam pohon sekitar 25-50 meter di lahan pembuangan sampah dengan permukaan penduduk. "Pungutan memotong debu, bau busuk sampah tidak merembek ke rumah warga," katanya.

Lokasi Pembuangan Sampah Dialihkan

BEKASI — PT Codang Tua Jaya akan mengalihkan pembuangan sampah dari zona 3 ke zona 5A. Pengalihan zona yang dilakukan oleh pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, ini akan dimulai Jumat (27/2).

radio guide

06.00-10.00	Radio 92.7
10.00-11.00	DI SHOW
11.00-12.00	DI SHOW
12.00-13.00	DI SHOW
13.00-14.00	DI SHOW
14.00-15.00	MOST WANTED
15.00-16.00	MOST WANTED
16.00-17.00	GENAHOLE
17.00-18.00	GENAHOLE
18.00-19.00	GENAHOLE
19.00-20.00	GENAHOLE
20.00-21.00	GENAHOLE
21.00-22.00	GENAHOLE
22.00-23.00	GENAHOLE
23.00-01.00	GENAHOLE
24.00-01.00	Radio 92.7

diambil

Amrullah Daulay Minta Hakim Batalikan Deklarasi

JAKARTA — Pengadilan Negeri 10...

Untuk membuktikan tidak ada...

proses tersebut. Amrullah Daulay...

ICW Laporkan Dugaan Korupsi di Tiga Kabupaten

JAKARTA — Organisasi Ombudsman...

Menteri energi dan pertambangan...

sementara pejabat tertinggi itu...

KM Marina Terbakar

Tiga orang tewas, 26 orang luka-luka, dan 110 orang diwawak.

BANJARMASIN — Sebuah terjadi kecelakaan yang memakan kapal motor...

KM Marina Nusantara itu berangkat...

"Kalau tidak salah seorang jua...

Petugas di kapal kejadian, hingga...

"Sebuah kendaraan di dalam kapal...

ter terdapat panyak di bagian kapal...

Sebagai upaya meminimalisir dampak...

Yana Ibrahim yang merupakan...

Di sana, terdapat 118 orang korban...

Selain di RS N Bostromono, RS...

"Kita akan berupaya mencari korban...



KAPAL TERBAKAR: Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke kapal Marina Nusantara yang terbakar setelah bertabrakan dengan tangkai...

Ribuan Petani Tolak RUU Pengadaan Tanah

Yogyakarta

JAKARTA — Peran aktif berwujud...

"Kami sangat bangga, kami kita...

istana Merdeka. Mereka meminta...

Kemudian, turut hadir Wakil...

terhubung dalam Perizinan Berusaha...

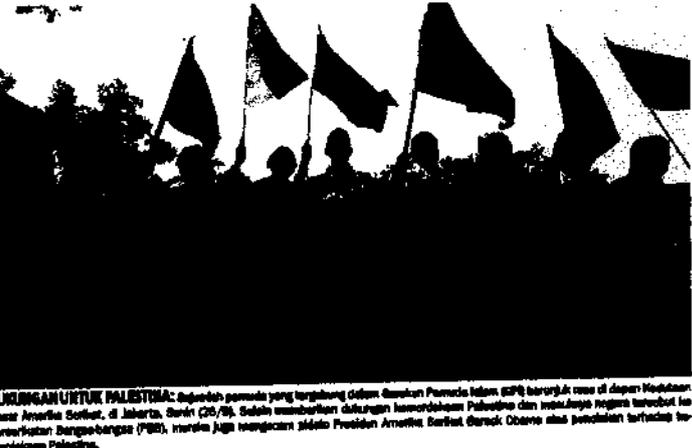
Koordinator FPR Jabar, Ardi...

Sebelumnya, anggota Prakerja...

itu, berdasarkan surat dari...

Kemudian ini bereskan karena...

Prakhal, sekretaris BPN, ada...



Dua Kubu KNPI Gelar Rapimnas Bersama

JAKARTA — Dua kubu pengurus...

Agung Laksana ini...

rapimnas pada 25-30 Oktober...

KNPI di bawah pengembara...

Perwakilan :

Daftar Bicara Call Nomb...

BUKA PENDAFTARAN !! Diklat Operasional Perbankan Syariah. Includes details about the training program, dates, and contact information.

Kader Minta PKS Keluar Koalisi

Enal Husein, Manajer Pugh

Keputusan sikap partai tetap diambil di Majelis Syuro.

JAKARTA—Sebuah mayoritas anggota Partai Koalisi Sejahtera (PKS) mengharapkan keluar dari koalisi. "Mayoritas mendesak untuk ke luar dari koalisi. DPD, DPC, dan DPW mayoritas menentang. Saya orang lapangan, jadi tahu betul," ujar Ketua DPD PKS Betralin, di Jakarta, Jumat (28/10).

Di mengatakan, alasan besarnya kader PKS yang meminta keluar karena menganggap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melanggar konstitusi. Ini lantaran penggantian kader PKS, Subarna Sukranata, dari posisi Menteri Sosial dan Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid II.

Ditambahkan, dukungan itu sangat banyak sejak tiga PKS beradu kenduri. SBY sebagai presiden tidak bisa dipertanyakan lagi. Dia memang, para kader tidak dapat membela negara. Apalagi, lanjutnya, PKS telah berjuang dengan perjuangan. "Kita akan berjuang seperti kita, bukan hanya tidak akan membela kita kemudian. Kita akan dengan kerja partai yang solid," ucapnya.

Mendapat dukungan mayoritas akan dapat runtuh mayoritas di partai, semua dia mengartikan, pengambilalihan jabatan untuk partai tetap akan diambil di Majelis Syuro yang berlangsung 60 orang Majelis itu harus akan mengesampingkan untuk memutuskan nasib PKS di koalisi pada November mendatang.

Konvensi Golkar

Sebelumnya itu, keputusan Partai Golkar untuk tidak memilih menduduki konvensi baik lokal atau nasional (terutama) dalam rangka pemilihan partai tersebut. Karena, sebagai itu, partai berambisi untuk bergabung ke koalisi untuk memenangkan konvensi yang dilakukan secara internal sebagai semangat satu suara. Perubahan ini ditentang oleh Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Rosadi Ruyudadi.

"Dengan tidak ada konvensi, tidak terdapat forum yang bisa dijadikan untuk membahas visi dan gagasan"

calon presiden dari Partai Golkar," ujarnya kepada Republika, Jumat. Menurutnya, konvensi seharusnya bukan sekadar memantapkan calon presiden (definitif) dari Golkar, tapi juga pertanggung jawaban visi dan gagasan individu-individu potensial dari internal partai.

Kalau pun Absarrel Baktis (Golkar) yang menjadi ketua umum DPP Partai Golkar itu terpilih sebagai ketua, kata dia, publik akan sulit melihat visi dan gagasannya ke depan jika konvensi itu tidak dilakukan. Ketika konvensi tidak dilakukan lagi, kata Rosadi, tentu saja memunculkan pertanyaan. "Mengapa saja Partai Golkar sedang merayakan kemenangan atas terbongkarnya koalisi?"

Menganggapi tak ada konvensi di Golkar, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L. Sembaga menyatakan, masalah itu tak perlu dibesarkan. Apalagi, kata dia, DPP Golkar sangat provinsi akses bulat menduduki posisi penunjukan lokal. "Mungkin hal ini dipertanyakan, tapi pada Oktober 2012," kata Theo dalam pertemuan Rapat Pimpinan Nasional di Partai Golkar.

Sembaga, hari beberapa surat menduduki konvensi lokal tidak akan dilakukan. Karena itu, ia meminta sangat tepat mengungkap dari berbagai calon presiden (kapita) pada Pemilu 2014.

Sembaga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Lektomo berpendapat bahwa tradisi di partai sudah berubah. Menurutnya, pemilihan dari internal partai dan eksternal sudah merupakan suatu realitas. Selain itu, lanjutnya, beberapa surat menduduki konvensi lokal tidak akan dilakukan. Karena itu, ia meminta sangat tepat mengungkap dari berbagai calon presiden (kapita) pada Pemilu 2014.

Sembaga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Lektomo berpendapat bahwa tradisi di partai sudah berubah. Menurutnya, pemilihan dari internal partai dan eksternal sudah merupakan suatu realitas. Selain itu, lanjutnya, beberapa surat menduduki konvensi lokal tidak akan dilakukan. Karena itu, ia meminta sangat tepat mengungkap dari berbagai calon presiden (kapita) pada Pemilu 2014.

Sembaga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Lektomo berpendapat bahwa tradisi di partai sudah berubah. Menurutnya, pemilihan dari internal partai dan eksternal sudah merupakan suatu realitas. Selain itu, lanjutnya, beberapa surat menduduki konvensi lokal tidak akan dilakukan. Karena itu, ia meminta sangat tepat mengungkap dari berbagai calon presiden (kapita) pada Pemilu 2014.

Sembaga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Lektomo berpendapat bahwa tradisi di partai sudah berubah. Menurutnya, pemilihan dari internal partai dan eksternal sudah merupakan suatu realitas. Selain itu, lanjutnya, beberapa surat menduduki konvensi lokal tidak akan dilakukan. Karena itu, ia meminta sangat tepat mengungkap dari berbagai calon presiden (kapita) pada Pemilu 2014.

Sembaga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Lektomo berpendapat bahwa tradisi di partai sudah berubah. Menurutnya, pemilihan dari internal partai dan eksternal sudah merupakan suatu realitas. Selain itu, lanjutnya, beberapa surat menduduki konvensi lokal tidak akan dilakukan. Karena itu, ia meminta sangat tepat mengungkap dari berbagai calon presiden (kapita) pada Pemilu 2014.

Sembaga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Lektomo berpendapat bahwa tradisi di partai sudah berubah. Menurutnya, pemilihan dari internal partai dan eksternal sudah merupakan suatu realitas. Selain itu, lanjutnya, beberapa surat menduduki konvensi lokal tidak akan dilakukan. Karena itu, ia meminta sangat tepat mengungkap dari berbagai calon presiden (kapita) pada Pemilu 2014.



AKSI SURIPAN PERINDA: Ratusan massa gabungan mahasiswa, seniman, dan buruh terlibat bertikai dengan aparat keamanan saat berunjuk rasa memperingati Suripan Perindas di halaman Gedung Indragiri, New Barat, Jumat (28/10). Untuk rasa ini berlangsung di berbagai kota. Mereka minta pemerintah meninjau pengakuan hukam secara nasional.

Menantu Ical Pimpin KNPI

JAKARTA—Mantan Absarrel Baktis (Golkar) yang menjabat juga sebagai Ketua Dewan Pengarah XXXI KNPI, Anasulhik Sugiandj, mengemukakan, Daifan memang di mana saja pemilihan yang dalam satu tahun. "Tahun mendatang 60 orang dari 150 peserta yang menduduki hak suara," ujar Anasulhik, kemarin.

Sugandi tidak memisahkan, para calon sudah bergeser satu per satu. Jumlah kandidat yang ikut adalah dua orang, yakni Akbar Dedi Karim dan Daifan Ica Nugroho.

Salah satu kandidat, Oktavari, menilai tidak memisahkan pemilihan sebagai tenaga umum KNPI. Ia menilai, alih-alih memilih dukungan di detik-detik terakhir sebagai memberi kesempatan orang lain untuk maju.

"Saya tidak mengembalikan formulir (pengunduran diri)," ujar Ketua Umum OKP Gerakan Mahasiswa Rakyat Kota kepada Republika.

Walaupun penarikan formulir dari para peserta yang banyak untuk mendidik.

Bursa pemilihan tahun akan KNPI itu dilaksanakan 14 kandidat, antara lain, Daifan Ictar, Nurani Hamid Qurta, DPP PAK, Nurani Zahri (aktivis Partai Demokrat), Sulhan Nohman (Anggota DPRD), Akbar Zulkaif (Ketua Majelis PKS), Oktavari, Afti Rahma (Ketua DPP KNPI/ Jakarta), dan Anasulhik Ahmad Dedi.

Pada konvensi, Daifan mengatakan, keputusannya juga dalam bursa persaingan tahun akan karena harus berpedoman dari apa yang tertera dalam anggaran dasarnya untuk pemilihan KNPI. "Apakah KNPI tidak pernah," katanya.

Dia berharap anggota KNPI sebagai lembaga milik semua pemuda. Selain itu, pihaknya siap menemani berpacuan lebih besar kepada pemuda yang menjadi anggota KNPI untuk lebih bergotong royong ke publik. "Saya ingin mengabdikan kitabah KNPI sebagai wadah berpacuan organisasi," jelasnya. (R) (2) (2) (2) (2)



BAPU PRAPRIWA: Menteri Keuangan Agus Martowardojo (samping) berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR Anis Matta, Pjua Sul Barman, dan Wakil Gubernur (di luar) saat rapat paripurna di DPR, Jakarta, Jumat (28/10). Rapat paripurna tersebut membahas pengesahan RUU APBN 2012 dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kapolri Akui Anggotanya Terima Imbalan

Enal Husein, Manajer Pugh

JAKARTA—Kapolri Jenderal Polri Tjatek Prapojo mengakui anggotanya di Pappas menerima imbalan dari PT Proport Indonesia terkait pengembalian hak pertambangan di Papua. "Saya juga mengakui bahwa kami sebagai aparat kepolisian menerima imbalan dari PT Proport Indonesia," ujar Tjatek, Jumat (28/10).

Tjatek mengatakan, PT Proport Indonesia telah mengembalikan hak pertambangan di Papua. "Saya juga mengakui bahwa kami sebagai aparat kepolisian menerima imbalan dari PT Proport Indonesia," ujar Tjatek, Jumat (28/10).

Tjatek mengatakan, PT Proport Indonesia telah mengembalikan hak pertambangan di Papua. "Saya juga mengakui bahwa kami sebagai aparat kepolisian menerima imbalan dari PT Proport Indonesia," ujar Tjatek, Jumat (28/10).

yang menerima imbalan dari Proport. Menurut Tjatek, imbalan dari Proport ini digunakan untuk operasional anggota polisi yang bertugas di Papua dalam rangka yang sangat sulit.

Menurut Tjatek, semua operasi yang dilakukan anggota polisi, termasuk dalam operasi pemertanian seperti pemertanian dari APBN, Numan, dan lain-lain, semua yang akan memberikan dana, ia mengakui, alasannya karena dapat dipertanggungjawabkan. "Tjatek dengan menggunakan bantuan dana imbalan dari Proport yang mencapai 14 juta dolar AS. "Dana itu bisa diganti saya kira, silakan mereka yang lain untuk maju."

Berbeda dengan Tjatek, pejabat TNI menyatakan tidak menerima imbalan dari PT Proport Indonesia sebagai imbalan pengembalian hak pertambangan di Papua. "Tjatek dengan menggunakan bantuan dana imbalan dari Proport yang mencapai 14 juta dolar AS. "Dana itu bisa diganti saya kira, silakan mereka yang lain untuk maju."

Panglima TNI Laksamana Agus Subartono, di Kantor Presiden kemarin, dengan mengatakan bahwa aparat keamanan ditugaskan untuk pengamanan kegiatan Ormas berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Artinya, karena terdapat tuntutan di anggota sebagai aset vital negara.

Menurut laporan itu, uang sebanyak itu diberikan untuk dukungan tambahan yang terdapat dalam pembangunan berbagai infrastruktur dan biaya lainnya. Menurut laporan itu, uang seperti uang nasional, biaya bantuan sosial, biaya bantuan kesehatan, uang jalan, dan biaya perjalanan lainnya. Selain itu, pihaknya juga diberikan untuk membayar biaya kebutuhan untuk kegiatan lainnya, biaya administrasi, dan program bantuan lainnya. (R) (2) (2) (2) (2)

Kabareskrim: Akan Saya Tangkap Backing Nunun

Enal Husein, Manajer Pugh

JAKARTA—Terungkap bahwa calon penerus yang tidak masuk dalam daftar pemilih orang (DPO) Numan Nurban di bawah di-backing orang kuat. Kabareskrim Komando Jenderal Polri Subarman menyatakan, tidak ada informasi besar di balik Numan. "Kalau saya sebagai (Nunun), saya tangkap backing-nya," ujar Subarman, di Mabes Polri, Jumat (28/10).

Subarman menegaskan, pihaknya sudah mulai mencari dan menangkap Numan Nurban di luar negeri. Polisi menandatangani perjanjian ekstradisi dalam menanggapi informasi terkait posisi Numan. Numan

sih ini, menurut Subarman, pihak kepolisian akan mendeteksi informasi berdasarkan informasi yang disampaikan Adang Darwisjanto itu.

Ia tak dapat menjelaskan proses pengembalian Numan, karena ini adalah strategi kepolisian. Jika terungkap Numan berambisi di satu negara, Polisi langsung menaruh perhatian di negara itu untuk pengawasan. Dengan apakah Polisi dapat melakukan hal-hal yang Numan dari balik internasional. Numan juga menyatakan, ia siap-siap di satu negara. "Kita akan, saya kira tidak perlu ditanyakan."

Korwil Pemberantasan Korupsi (PKPK) mengatakan, tetap melakukan pencarian terhadap Numan. KPK meng-

ambil informasi mengenai Numan karena sebagai salah satu hal yang sangat penting. "Ya, kita tetap harus mencari," kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah di Jakarta, Jumat (28/10).

Chandra mengatakan, ia akan meninjau kembali proyek PLSN Numan di Wapayanti. Namun, menurut Chandra, proyek PLSN Numan di Wapayanti ini sangat penting bagi terwujudnya rencana pembangunan. "Kita akan meninjau kembali proyek PLSN Numan di Wapayanti. Namun, menurut Chandra, proyek PLSN Numan di Wapayanti ini sangat penting bagi terwujudnya rencana pembangunan."

Korwil Pemberantasan Korupsi (PKPK) mengatakan, tetap melakukan pencarian terhadap Numan. KPK meng-

akan meninjau semua proyek yang berkaitan dengan proyek PLSN Numan di Wapayanti. Namun, menurut Chandra, proyek PLSN Numan di Wapayanti ini sangat penting bagi terwujudnya rencana pembangunan. "Kita akan meninjau kembali proyek PLSN Numan di Wapayanti. Namun, menurut Chandra, proyek PLSN Numan di Wapayanti ini sangat penting bagi terwujudnya rencana pembangunan."

Korwil Pemberantasan Korupsi (PKPK) mengatakan, tetap melakukan pencarian terhadap Numan. KPK meng-

akan meninjau semua proyek yang berkaitan dengan proyek PLSN Numan di Wapayanti. Namun, menurut Chandra, proyek PLSN Numan di Wapayanti ini sangat penting bagi terwujudnya rencana pembangunan. "Kita akan meninjau kembali proyek PLSN Numan di Wapayanti. Namun, menurut Chandra, proyek PLSN Numan di Wapayanti ini sangat penting bagi terwujudnya rencana pembangunan."

Korwil Pemberantasan Korupsi (PKPK) mengatakan, tetap melakukan pencarian terhadap Numan. KPK meng-

Korwil Pemberantasan Korupsi (PKPK) mengatakan, tetap melakukan pencarian terhadap Numan. KPK meng-

SPIRIT OF QURBAN

www.griya.com

Hotline : 0830 0240 567

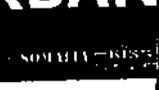
Careline : 021-725 4242

Fax : 021-725 4389

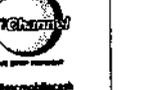
@griyaonline



GRIYA
YATINI &
DHUFA



SOPIA - INSPIRA



FIRAQATUN

Pembatalan PT Belum Final

Pembahasan lanjutan di Baleg akan dilakukan pada Rabu (1/6).

JAKARTA — Badan Legislatif (Baleg) DPR akan melanjutkan pembahasan rapat piano terkait dengan besaran angka ambang batas paritaman atau persentase (threshold) PT. Hasil piano Baleg, pekan lalu, yang membatalkan pembatasan angka 3 persen ke paritaman, dianggap belum memuaskan.

Ketua Baleg DPR, Ignatius Muliyil, mengatakan bahwa pembahasan rapat piano PT 3 persen yang akan dibawa ke paritaman DPR belum selesai. Masalah itu baru akan ada rapat lanjutan pada Rabu (1/6). Uraian ini dikemukakan Ignatius karena rapat baru akan dilakukan pada tingkat paritaman dan bukan di tahapan Baleg. Ignatius menegaskan bahwa paritaman 1 April belum dicabut dan baru akan diturunkan dalam rapat lanjutan yang akan dilakukan Rabu (1/6) besok. Ignatius mengatakan, rapat lanjutan ini akan menyetujui apakah Baleg akan membuat satu angka besaran PT ke sidang paritaman. "Kami ingin membuat produk tersebut yang semua bisa terima," kata Ignatius saat dihubungi, Ahad (28/5). Wakil Ketua Baleg, Idris Fauzyah (Praksi PKS), me-

ngatakan, angka 3 persen sebenarnya sudah dipukul, cuma Golkar masih tak setuju. Wakil Sekjen DPP PPP, Rosuburnumy, juga menegaskan bahwa kaputusan Baleg 5 April masih berlaku dan belum mempengaruhi proses Golkar. "Bukan ada yang berubah, angka masih tetap 3 persen," kata politisi yang dianggap KAMI itu.

Dijelaskannya, Golkar memang mengizinkan bahwa paritaman 5 April yang dikaji tidak mengancam paritaman yang mengancam ambang batas 4-5 persen. Golkar pun bersedia agar seluruh urusan ambang batas tidak dimasukkan dalam klausul, dan bukan dijadikan catatan. "Rapi, rapat kemarin tidak memuatnya karena secara prosedural tidak bisa," ujar Rosub.

Ia menambahkan agar fraksi-fraksi tidak berkeras menuntut besaran angka ambang batas, mengingat pembahasan oleh Baleg sudah berupa draft yang akan kembali dibahas saat bertemu dengan paritaman. "Di pembahasan tingkat dan bersama pemerintah, maka pembahasan tidak sampai ke paritaman," kata Rosub.

Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Hudaib, hanya menyetujui bila ada perubahan ambang batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini akan mempengaruhi pembahasan awal UU Pemilu. Muliyil menuliskan semua fraksi berkoordinasi satu paritaman Baleg yang telah dibuat sebelumnya.

Ketua DPP Hamura, Akbar Falaq, mengatakan Hamura, bersama PKS, Gerin-

dra, dan PPP menginginkan PT tetap dipertahankan seperti Pemilu 2009 sebesar 2,5 persen. Namun, Golkar bersama PDIP bentukan PT 3 persen untuk memperbaiki jumlah parpol peserta pemilu, sementara Demokrat memiliki 4 persen dan PKS antara 3-4 persen.

Akhir mengingatkannya, jika keputusan Baleg kembali dibatalkan, akan ada masalah UU Parpol bahwa waktu pelaksanaan pemilu sudah dimulai 2,5 tahun sebelum penyelenggaraan dilaksanakan. Karena itu, ia meminta agar keputusan Baleg atas rapat 5 April lain tetap dipertahankan.

Wawancara dengan

Sekjen DPP PAN, Taufik Kurniawan, meminta agar setiap parpol atau draft Baleg lain. Tujuannya ialah agar masalah ini tidak menjadi tabu-paritaman paritaman. "Begitu ada kesepakatan di Baleg, diharapkan tidak ter-lalu ditanyakan politik saat paritaman di paritaman DPR."

Sebagai dalam pembahasan setiap RUU, menurut Taufik, akan ada forum lobi untuk menyampaikan berbagai perubahan paritaman ini. PAN mengingatkannya akan tidak sampai ke paritaman setelah undang-undang PT sebesar 2,5 persen dengan 5 persen.

Taufik juga mengatakan, ada kemungkinan masalah ini akan dibahas kembali jika terjadi hambatan pembahasan di tingkat lobi politik DPR. Tetapi diharapkan bisa menyolidkan masalah PT ke-10 dan paritaman



KAMPANYE ANTIBOMOK

Sejumlah mahasiswa dan aktivis Serikat Mahasiswa Pedokteran Indonesia (SMPI) menggelar aksi kampanye antibomok dalam rangka Hari Antiterrorisme Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (28/5). Kampanye yang diikuti lebih dari 30 SMPI mahasiswa kedokteran se-Indonesia itu mengajak masyarakat berhenti merokok.

Sempat Mereda, Polemik KNPI Memanas Lagi

JAKARTA — Setelah sempat dingin, polemik keparitaman DPP KNPI kembali memanas. Ketua DPP KNPI yang diprotes Ahmad Doll yang menolak aksi demonstrasi Azis Syamsuddin yang sudah tetap mengancam KNPI.

Ketua Bidang Hubungan dan HAM DPP KNPI, Zulfahri Hosen, pun menyayangkan tindakan Azis Syamsuddin yang tetap mengancam KNPI. Menurut dia, KNPI yang sudah sudah yang diprotes Ahmad Doll, Kurnia dan Sekjennya Paksi Fajar. "Kami baru menyalahkan ini kepada satu pihak," kata Zulfahri, Ahad (28/5).

Dijelaskannya, masalah ini bisa dilihat dari proses dan prosedur kongres yang sedang berjalan dengan AD/ART. Keabsahan kepemimpinan Doll juga ditanyakan Patman Panggaban Nagari (PAN) Jakarta pada November 2010 lalu. Selain itu, Kesenamban juga telah menandatangani surat protes dan logo KNPI kepada Ahmad Doll Kurnia.

Zulfahri menyalahkan tindakan Azis Syamsuddin adalah hal yang tidak etis. Azis dianggapnya telah melanggar keputusan PN Jakarta. Padahal, sebagai anggota paritaman yang menyelenggarakan KNPI, sebagai anggota paritaman yang menyelenggarakan KNPI digunakan untuk kepentingan politik pribadinya.

Sementara itu, Azis Syamsuddin yang ditentang oleh sidang itu mengatakan, "Lebih baik saya tidak berkomentar saja." Dianggapkannya, paritaman polemik KNPI saat ini proses Indonesia masih ber-

sebagai orang yang menjunjung tinggi hukum.

Tetapi ada satu tidaknya upaya hukum, kata Zulfahri, sebenarnya Azis menyalahkan diri dalam menyalahkan tindakan yang sudah politis dan berpolitik dengan paritaman PN Jakarta DPP KNPI, kata dia, tidak bisa menyalahkan diri dalam Azis yang mengancam KNPI digunakan untuk kepentingan politik pribadinya.

Sementara itu, Azis Syamsuddin yang ditentang oleh sidang itu mengatakan, "Lebih baik saya tidak berkomentar saja." Dianggapkannya, paritaman polemik KNPI saat ini proses Indonesia masih ber-

jalan. Azis naik banding dengan putusan PN Jakarta Selatan. "Jadi, lebih baik kita tunggu saja putusan pengadilan. Saya tidak akan berkomentar," ungkap politisi Partai Golkar tersebut. Sebelumnya, Azis Syamsuddin mengatakan, rekan-silari dan klub organisasi kepemudaan tersebut akan dilakukan melalui kongres bersama pada Oktober 2011. "Sudah ada kata sepakat dari kedua pihak untuk melakukan rekonsiliasi melalui kongres bersama pada Oktober bersama," katanya, saat bertemu Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Setiawan, di Jakarta, Kamis lalu. (Bersambung ke halaman 6)

Aksi "Tanpa Tembak Bom" pada Rabu (1/6) akan mengkritik tema "Jasa Tanpa Sepak Bola Indonesia". Ribuan peserta aksi ini akan berkumpul di Bundaran HI untuk mengajukannya kepada pemerintah. Aksi ini akan digelar di Bundaran HI, Jakarta Selatan.

Per 31 Maret 2011 dengan angka perbandingan per 31 Maret 2010 / Dalam jutaan Rupiah

Kategori	2010	2011	Perubahan (%)	Kategori	2010	2011	Perubahan (%)
A. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	B. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
B. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	C. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
C. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	D. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
D. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	E. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
E. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	F. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
F. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	G. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
G. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	H. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
H. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	I. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
I. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	J. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
J. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	K. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
K. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	L. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
L. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	M. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
M. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	N. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
N. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	O. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
O. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	P. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
P. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	Q. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
Q. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	R. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
R. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	S. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
S. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	T. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
T. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	U. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
U. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	V. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
V. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	W. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
W. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	X. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
X. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	Y. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33
Y. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33	Z. Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.300.000	8,33

www.mega-yamaha.com
 500 CENTER | 001-000-2346
 MEGA SYNGAH CALL (021) 7919-2346



**KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Oktober 2008

Nomor : 3867 / MENPORA.D1/10/2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kepengurusan DPP KNPI

Yth. Gubernur Seluruh Indonesia
u/p. Kepala Dinas/Badan/Biro yang menangani Kepemudaan Provinsi
Di tempat

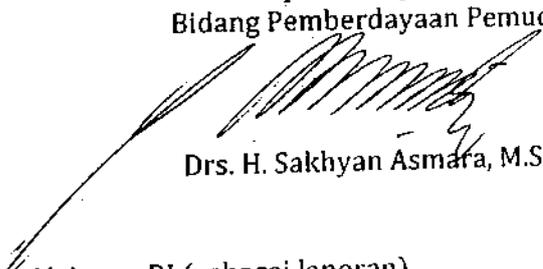
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kongres Pemuda/KNPI tanggal 28 Oktober s.d 2 November 2008 di Denpasar-Bali, dengan hormat kami beritahukan mengenai status kepengurusan DPP-KNPI sesuai laporan dari DPP KNPI kepada Menpora RI melalui surat nomor: 10-15/DPP-KNPI/VIII/2008 tanggal 10 Agustus 2008 tentang laporan hasil Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) KNPI pada tanggal 22-25 Juli 2008 di Pekanbaru yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) KNPI tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008 telah menonaktifkan Sdr. Hasanuddin Yusuf dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP-KNPI, yang untuk selanjutnya dapat kembali menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Kongres KNPI XII, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan MPP KNPI nomor : 03/TAP/MPP-KNPI/2008 tanggal 25 Juli 2008.
2. Selanjutnya untuk memimpin KNPI melaksanakan roda organisasi khususnya menjelang Kongres pada bulan Oktober 2008, Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) KNPI menetapkan Pengangkatan Sdr. Hans Havlino Silalahi sebagai Penjabat Ketua Umum DPP KNPI, yang bertugas untuk mengambil segala langkah strategis dalam kerangka menyelamatkan organisasi dan melaksanakan Kongres XII sebagaimana tertuang di dalam Keputusan MPP-KNPI nomor : 04/TAP/MPP-KNPI/2008 tanggal 25 Juli 2008.

Berkenaan dengan itu sambil menunggu hasil Kongres Pemuda/KNPI XII untuk menetapkan kepengurusan baru DPP-KNPI yang definitif, maka Keputusan MPP KNPI tahun 2008 kami jadikan acuan dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan program pembangunan kepemudaan di tanah air.

Demikian kami sampaikan agar dapat kiranya menjadi pedoman dan penyesuaian dalam melaksanakan koordinasi dengan DPP KNPI.

Deputi Menpora RI
Bidang Pemberdayaan Pemuda


Drs. H. Sakhyani Asmara, M.SP

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI (sebagai laporan)
2. Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0397.A/MENPORA/2/2009
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil
Penyatuan DPP KNPI**

Jakarta, 12 Februari 2009

Kepada Yth.
BAPAK MENKOKESRA RI
di Jakarta

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak Menkokesra melanjutkan laporan kami terdahulu kepada Bapak Presiden yang tembusannya kami sampaikan kepada Menkokesra RI tentang upaya penyatuan DPP KNPI, maka pada tanggal 8-9 Februari 2009 telah dilaksanakan Pertemuan Pimpinan OKP Tingkat Nasional dan DPD KNPI Provinsi Se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat.

Dari laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang Pertemuan (terlampir) ringkasannya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Pertemuan Pimpinan OKP Tingkat Nasional dan DPD KNPI Provinsi se-Indonesia, diselenggarakan berdasarkan undangan dari Tim Enam selaku Pemegang Mandat dari masing-masing Kepengurusan DPP KNPI baik Kongres Ancol maupun Bali;
- 2) Sesuai dengan surat dari Tim Enam (fotokopi surat terlampir), penyelenggara pertemuan dipercayakan kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat selaku pelaksana teknis yang tempat pelaksanaannya di Hotel Savoy Homan Jl. Asia Afrika No. 112 Bandung;
- 3) Pertemuan dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, pada hari Minggu, 8 Februari 2009 yang dihadiri oleh Saudara Doli Ahmad Kurnia beserta para pimpinan OKP pro Kongres Ancol dan Saudara Azis Syamsudin beserta para pimpinan OKP pro Kongres Bali;
- 4) Pertemuan diikuti oleh 101 peserta dengan perincian 72 OKP dan 29 DPD KNPI dengan menyertakan surat mandat dari pimpinan organisasi;

- 5) Setelah melalui proses persidangan, pertemuan menyepakati untuk melakukan pemilihan terhadap proses penyelesaian yang diusulkan oleh Saudara Doli atau yang diusulkan oleh Saudara Azis. Saudara Doli mengusulkan penyelesaian melalui proses hukum sedangkan Saudara Azis mengusulkan melalui pemilihan produk kongres;
- 6) Dari hasil pemilihan, peserta menyepakati penyelesaian penyatuan DPP KNPI dilakukan melalui pemilihan produk Kongres yakni memilih produk Kongres Ancol atau produk Kongres Bali;
- 7) Dari pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka, sebanyak 58 peserta memilih produk Bali, 8 peserta memilih produk Ancol, 10 peserta menyatakan abstain, dan 25 peserta tidak menggunakan hak suara;
- 8) 7 OKP yang memilih produk Ancol menyatakan dapat menerima hasil keputusan pertemuan Bandung dan konsisten untuk mengawal dan mengamankannya. Sedangkan 1 DPD KNPI Provinsi yang memilih produk Ancol tidak memberikan pernyataan apapun;
- 9) Segala dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pertemuan tersebut kami sertakan lampiran.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak Menkokesra kami ucapkan terima kasih.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,



[Handwritten signature]
Dr. Sahyaksa Dault, M.Si

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sdr. Menteri Sekretaris Negara RI.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 34 /MENKO/KESRA/II/2009
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penyatuan DPP KNPI

Jakarta, 13 Februari 2009

Kepada Yth
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
di
Jakarta

Menanggapi surat Saudara Nomor : 0397A/MENPORA/2/2009 tertanggal 12 Februari perihal hasil penyatuan DPP KNPI, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya telah mencermati laporan Saudara dan dapat memahami langkah-langkah yang telah dilakukan sampai terselenggaranya Pertemuan Pimpinan OKP Tingkat Nasional dan DPD KNPI Provinsi Se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat tanggal 8-9 Februari 2009 (Pertemuan Bandung).
2. Dengan kehadiran perwakilan OKP dan DPD KNPI Provinsi yang representatif serta proses pertemuan yang demokratis, maka saya menganggap proses penyatuan KNPI telah selesai.
3. Dengan demikian selaku pemerintah kita harus menghormati hasil pertemuan Bandung dengan hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Selanjutnya saya minta Saudara selaku Menteri Negara Pemuda dan Olahraga untuk segera menindak lanjuti dengan menetapkan Dewan Pengurus Pusat KNPI hasil pertemuan Bandung sebagai Partner Pemerintah dalam Pengembangan Kepemudaan dan untuk disesuaikan dengan aturan yang ada.

Atas perhatian Saudara Menteri saya ucapkan terima kasih.



Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat RI

Aburizal Bakrie
Aburizal Bakrie

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara RI

SURAT KETERANGAN
No : 02/SDM-Diklat/VIII/2012

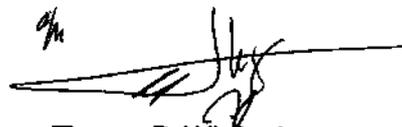
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Dudi Iskandar
NIM : 55210110033
Fakultas : Ilmu Komunikasi
Magister : Komunikasi Politik
Universitas : Mercu Buana, Jakarta

telah melakukan wawancara dengan Kepala Desk Politik-Hukum-dan HAM, Sdr. M. Subhan SD pada tanggal 12 Juli 2012, pukul 16.30 – 18.00 WIB, di Redaksi Kompas dengan judul thesis *"Representasi Kekuasaan dalam Konflik KNPI 2008 – 2011 (Analisis Framing Berita Kompas, Jurnal Nasional dan Republika)."*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Jakarta, 1 Agustus 2012



Tonny D. Widiastono
Manajer Pendidikan & Pelatihan

TON/la



SURAT KETERANGAN

007/SK/Red/JN/VI/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemimpin Redaksi Surat Kabar *Jurnal Nasional* dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Dudi Iskandar**
NIM : 55210110033
Nama Universitas : Universitas Mercu Buana
Fakultas/Jurusan : Komunikasi Politik

Nama tersebut di atas adalah benar telah riset untuk penyusunan Tesis di Surat Kabar *Jurnal Nasional* dengan judul **“Representasi Kekuasaan dalam Konflik KNPI 2008-2011”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Juni 2012

Jurnal Nasional

Wahyudi M. Pratopo
Pemimpin Redaksi

BIODATA PENELITI



Dudi Iskandar adalah putra sulung dari pasangan (alm) Badrudin Saleh dan Hadiatin. Ia dilahirkan di Bandung, 5 Maret 1972. Strata satu diselesaikan pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 1996, dengan predikat *cum laude*. Program magister dirampungkan pada Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta, dengan spesialis *political communication*.

Selama 10 tahun menjadi wartawan di berbagai media cetak dan *online*. *Media Indonesia* (Oktober 2001- November 2007), *Koran Jakarta* (Desember 2007-Maret 2010), dan *beritasatu.com* (Juni-Juli 2010). Sebelum dan sesudah menjadi wartawan, aktivis HMI era 1990-2000 ini, produktif menulis di berbagai media cetak. Puluhan tulisan dimuat di *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Seputar Indonesia*, *Sinar Harapan*, dan *Pikiran Rakyat*.

Enam buah buku yang sudah ditulis dan dieditnya. Yakni, *Rekonstruksi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI* bersama Andito (1998), *Kajaiban di Tanah Suci saat Haji dan Umrah* (2004), *Haji ; Antara Aroma Bisnis dan Tarikan Spiritual* (Editor)

(2005), *Menggapai Demokrasi; Jejak Politik HR Syaukani* bersama Hery Susanto dan Ali Amran Hasibuan (2006), dan *Perjalanan Sebuah Bangsa; Catatan 80 Tokoh Nasional* (2008) bersama Dwi Agus Susilo dan Masad Masrur, *Jejak Prestasi Olahraga Indonesia 1951-2011 (SEA Games, Asian games, dan Olimpiade)* (2011)

Menikah dengan Yulia Dewi Ratih (2003) dan dikarunia dua putri, Salsabila Anfang Mahadewi (6 tahun) dan Salsabila Alfa Mahaputeri (4,5 tahun). Kini tinggal di Blok F8-8, Puri Bintaro Hijau, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Untuk korespodensi bisa dihubungi melalui dudisabiliskandar@yahoo.com.